

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

**PENYEDIAAN DATA PRIMER HUBUNGAN BILATERAL
KEPARLEMENAN MELALUI *PARLIAMENTARY SNAPSHOT***



Disusun oleh:

Nama : Devindra Ramkas Oktaviano
NIP : 199412152024041001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama

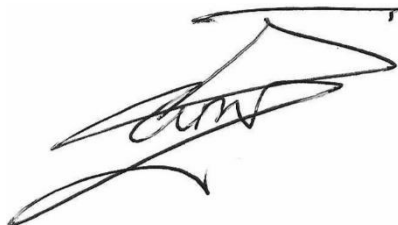
**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Devindra Ramkas Oktaviano
NIP : 199412152024041001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama
Judul : Penyediaan Data Primer Hubungan Bilateral Keparlemenan Melalui
Parliamentary Snapshot

Jakarta, 15 Oktober 2024

Peserta Pelatihan Dasar



Devindra Ramkas Oktaviano
NIP. 199412152024041001

Mengetahui,
Coach



Indra Cakra Buana, M.Si.
NIP. 199010032018011002

Menyetujui,
Mentor



Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si
NIP. 196202261990031002

KATA PENGANTAR

Pembuka kata, saya sampaikan puji beriring syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan karunianya serta salam kepada teladan umat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Salam. Berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak, saya berhasil melaksanakan aktualisasi yang bertajuk “Penyediaan Data Primer Hubungan Bilateral Keparlemenan Melalui *Parliamentary Snapshot*” sebagai salah satu prasyarat kelulusan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI Golongan III Angkatan XI Tahun 2024.

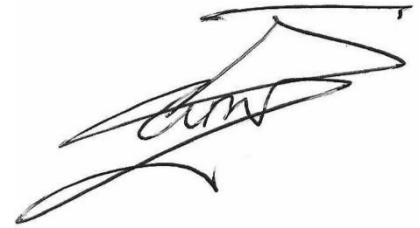
Terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, ayah (Oktovariawan) dan adik perempuan (Desrivina Ramkas Oktaviani), yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada saya. Rasa hormat dan terima kasih saya sampaikan juga kepada:

- 1) Bapak Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.IKom, selaku Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkarir di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- 2) Bapak Dr. Inosentius Samsul. S.H., M.Hum selaku Kepala Badan Keahlian DPR RI yang dengan antusias menyambut dan memotivasi saya untuk memberikan sumbangsih keahlian di Badan Keahlian DPR RI;
- 3) Bapak Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A., selaku Kepala Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sekaligus atasan langsung saya yang telah memfasilitasi dengan sangat baik sejak hari pertama bekerja di Setjen DPR RI. Ucapan terima kasih juga sampaikan kepada Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk terlibat dalam perhelatan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership ke-2 sehingga menjadi inspirasi pemilihan topik pada rancangan aktualisasi ini;
- 4) Ibu Puteri Hikmawati, S.H., M.H., selaku Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada saya;
- 5) Bapak Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si. selaku mentor selama pelaksanaan aktualisasi yang telah mencurahkan wawasan dan pengetahuan kepada saya untuk menghasilkan dengan baik rancangan aktualisasi ini;
- 6) Bapak Indra Cakra Buana, M.Si. selaku *coach* selama pelaksanaan aktualisasi yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun rancangan aktualisasi ini;
- 7) Rekan-rekan analis senior di lingkungan Pusat Analisis Keparlemenan yang telah memberikan pengayaan substansi kepada rancangan aktualisasi yang saya susun; dan

8) Teman-teman CPNS Analis Legislatif Tahun Anggaran 2023 selaku rekan seperjuangan.

Atas kekurangan yang mungkin dijumpai pada laporan pelaksanaan aktualisasi ini, saya menerima masukan saran dan kritikan. Semoga ini bisa menjadi persembahan awal terbaik saya bagi instansi kerja dan negara.

Jakarta, 15 Oktober 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Devindra', with a large, stylized flourish extending from the bottom left.

Devindra Oktaviano

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB 2 PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN	5
2.1 Visi dan Misi Organisasi	5
2.2 Struktur Organisasi	6
2.3 Tugas dan Fungsi Jabatan.....	7
BAB 3 PENETAPAN ISU PRIORITAS	9
3.1 Identifikasi Isu.....	9
3.1.1 Deskripsi Isu Kesatu.....	9
3.1.2 Deskripsi Isu Kedua	11
3.1.3 Deskripsi Isu Ketiga	12
3.2 Penetapan Isu.....	17
3.2.1 Penapisan Isu	17
3.2.2 Pemilihan Isu	17
3.3 Analisis Isu	18
3.3.1 Analisis Kausalitas	18
3.3.2 Analisis Situasi.....	20
3.4 Pemecahan Isu	20
BAB 4 RANCANGAN AKTUALISASI	23
4.1 Matriks Rancangan Aktualisasi	23
4.2 Jadwal	29

BAB 5 Pelaksanaan aktualisasi	31
5.1 Deskripsi Pelaksanaan	31
5.1.1 Pelaksanaan Pemetaan Data.....	31
5.1.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	31
5.1.3 Pelaksanaan Pengolahan Data.....	34
5.1.4 Pelaksanaan Penyajian Data	39
5.2 Pemangku Kepentingan	43
5.3 Kendala dan Strategi Menghadapinya	43
5.4 Dampak	44
5.4.1 Dampak jangka pendek	44
5.4.2 Dampak jangka panjang	44
BAB 6 PENUTUP.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	ix
LAMPIRAN	x
Lampiran 1 Galeri Foto Mentoring	x
Lampiran 2 Galeri Foto Coaching.....	xi
Lampiran 3 Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi.....	xii
Lampiran 4 Formulir Alat Bantu Coaching Aktualisasi	xv
Lampiran 5. Dokumentasi Testimoni	xvii
Lampiran 6. Berkas Parliamentary Snapshot.....	xix

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Identifikasi dan Deskripsi Isu	14
Tabel 2. Pengukuran USG tiga isu pada unit kerja	18
Tabel 3. Aspek SMART dari gagasan Parliamentary Snapshot.....	22
Tabel 4 Matriks Rancangan Aktualisasi	23
Tabel 5. Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi	29
Tabel 6. Matriks Pengolahan Data Parliamentary Snapshot	36
Tabel 7. Kendala Pelaksanaan Aktualisasi dan Strategi Menghadapinya	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.....	6
Gambar 2. Ruang Kerja Analis di PUSAKA.....	9
Gambar 3. Tingkat ketersediaan ruang kerja bagi CPNS Anleg.....	10
Gambar 4. Ruang kerja bersama CPNS Analis Legislatif.....	10
Gambar 5. Model Snapshot Hubungan Bilateral versi Kemlu.....	11
Gambar 6. Aktualitas informasi hubungan bilateral pada laman resmi DPR.....	12
Gambar 7. Tampilan beranda dan salah satu muatan informasi pada laman resmi PUSAKA	13
Gambar 8. Diagram fishbone analisis isu utama	19
Gambar 9. Wawancara penulis dengan Analis Legislatif Ahli Madya Teddy Prasetyawan....	32
Gambar 10. Wawancara penulis dengan Analis Legislatif Ahli Madya Yulia Indahri.....	32
Gambar 11. Wawancara penulis dengan Kabag Kerja Sama Bilateral Iis Muldiyanti.....	34
Gambar 12. Penulis melakukan studi kepustakaan untuk data parliamentary snapshot	34
Gambar 13. Potret Layar percakapan penulis dengan Kabag Kerja Sama Bilateral BKSAP .	40
Gambar 14. Improvisasi lembar informasi BKSAP melalui <i>parliamentary snapshot</i>	41
Gambar 15. Sosialisasi parliamentary snapshot di Lingkungan PUSAKA.....	42
Gambar 16. Daftar hadir sosialisasi Parliamentary Snapshot di PUSAKA	42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, melayani, dan berdaya saing merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Cita-cita ini diwujudkan dengan menghadirkan tata kelola rekrutmen yang memantapkan integritas moral, kejujuran, semangat nasionalisme, motivasi kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, serta memperkuat kompetensi setiap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses ini dibangun mulai tahapan Pelatihan Dasar (Latsar) yang berlangsung setahun pertama sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR) pada tahun 2023 telah merekrut 97 orang CPNS yang terdiri dari 68 orang CPNS golongan III dan 29 orang CPNS golongan II. Sebanyak 34 orang CPNS golongan III mengikuti Latsar Angkatan XI yang berlangsung mulai 24 Juni 2024 sampai dengan 5 Oktober 2024. Sebagai bentuk aktualisasi atas hasil pembelajaran pada 8 minggu pertama Latsar, setiap CPNS melaksanakan aktualisasi.

Pelatihan dasar diselenggarakan dengan metode pembelajaran campuran (*blended learning*) yang dibagi dalam beberapa agenda. Agenda pertama adalah sikap dan perilaku bela negara. Agenda kedua adalah nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Agenda ketiga adalah manajemen ASN dan ASN *smart*. Agenda keempat adalah habituasi. Kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama keempat agenda tersebut diimplementasikan pada pelaksanaan aktualisasi selama masa habituasi.

Pelaksanaan aktualisasi diawali dengan menyusun sebuah rancangan aktualisasi dengan bimbingan berkala oleh *coach* dan *mentor*. Dokumen ini membahas tentang identifikasi masalah di lingkungan kerja CPNS, analisis penyebab dan dampak setiap masalah tersebut, pemilihan masalah prioritas, usulan gagasan pemecahan masalah, dan rancangan pelaksanaan aktualisasi. Rancangan aktualisasi merupakan syarat untuk memasuki tahap habituasi latsar. Oleh karena itu, disusunlah tulisan ini sebagai sebuah rancangan aktualisasi yang diajukan pada Seminar Rancangan Aktualisasi pada Agenda 4 Pelatihan Dasar CPNS.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 memberikan fungsi tambahan baru kepada DPR yaitu fungsi diplomasi. Menurut pasal 69 pada undang-undang tersebut, ketiga fungsi utama DPR di atas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada pasal 5 juga telah menerangkan bahwa DPR juga merupakan salah satu penyelenggara hubungan luar negeri.

Dalam mengimplementasikan fungsi diplomasi keparlemenan tersebut, anggota DPR difasilitasi oleh alat kelengkapan dewan yang dinamakan sebagai Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Badan Keahlian DPR melalui Pusat Analisis Keparlemenan (PUSAKA) memberikan layanan keahlian kepada anggota dewan beserta alat kelengkapannya termasuk dalam kerangka mendukung agenda diplomasi keparlemenan. Mengacu pada proses bisnis tersebut dapat dirumuskan bahwa PUSAKA mengemban tugas yang penting dalam memastikan terselenggaranya fungsi diplomasi keparlemenan dengan optimal.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Badan Keahlian DPR RI dan Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusat Analisis Keparlemenan menerangkan bahwa salah satu permasalahan yang mengemuka pada unit kerja tersebut adalah ketersediaan dan akses data primer yang sangat terbatas. Meskipun melaksanakan fungsi analisis dan asistensi yang sarat akan pengolahan data, dalam banyak kasus, kedua unit kerja tersebut bergantung pada data primer di lembaga eksekutif, data yang tersebar secara sporadis pada tenaga ahli, ataupun pencarian serta merta secara daring. Situasi ini juga berlaku pada saat Pusat Analisis Keparlemenan memformulasikan materi dan lampiran dokumen lainnya yang diperlukan DPR dalam setiap agenda diplomasi keparlemenan.

Analisis Legislatif (dulunya peneliti) merupakan jabatan fungsional binaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang memiliki peran analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung anggota dewan dan alat kelengkapannya melaksanakan fungsi-fungsi DPR. Pada tanggal 2 Mei 2024, sebanyak 34 CPNS Analisis Legislatif rekrutmen tahun anggaran 2023 mulai berdinasi di PUSAKA. Di tengah transformasi dari Pusat Penelitian menjadi Pusat Analisis Keparlemenan, kehadiran CPNS baru diharapkan dapat memperkuat kapabilitas PUSAKA untuk menindaklanjuti kendala ketersediaan data primer yang terbatas. Merujuk pada Peraturan MenpanRB nomor 11 tahun 2022, Analisis Legislatif dari jenjang ahli pertama hingga ahli utama dapat mengimplementasikan sebuah gagasan untuk memecahkan permasalahan di atas melalui eksekusi peran analisis, asistensi, dan ekspose.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- 6) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan perubahannya yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023;
- 8) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;
- 9) Surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Nomor: 3100/D.3/PDP.03.5 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyelenggaraan Latsar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI.
- 10) Surat Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor B/644/DL.02.01/6/2024 tentang penugasan Mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan XI dengan metode Blended Learning (pembelajaran campuran) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif pada 24 Juni s.d 5 Oktober 2024.

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan aktualisasi pelatihan dasar CPNS adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien.
- 2) Menginternalisasikan nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan.
- 3) Mempertajam kemampuan analisis isu kontemporer.
- 4) Menanamkan nilai-nilai dasar ASN yakni berorientasi melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
- 5) Memberikan pemahaman tentang manajemen CPNS dan menanamkan prinsip-prinsip SMART ASN.
- 6) Mempersiapkan mental dan fisik CPNS agar siap menghadapi tantangan dan dinamika pekerjaan.
- 7) Membentuk sikap profesionalisme yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga CPNS dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

1.4 Manfaat

Manfaat pelaksanaan aktualisasi pelatihan dasar CPNS adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN dengan baik dan efisien.
- 2) Terinternalisasinya nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan sehingga meningkatkan kesiapsiagaan bela negara.
- 3) Nilai berorientasi melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif tertanam dengan baik pada setiap ASN.
- 4) Terbangunnya kesiapan mental dan fisik CPNS untuk menghadapi tantangan dan dinamika pekerjaan.
- 5) Terimplementasikannya sikap profesional dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga CPNS dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.
- 6) Menumbuhkan motivasi untuk mengimplementasikan tata kelola cerdas (*smart governance*) di instansi penempatan;
- 7) Memperkuat kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu yang berkembang di tingkat unit kerja hingga tingkat global;

BAB 2

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

2.1 Visi dan Misi Organisasi

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Disadur dari lampiran Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024, visi Setjen DPR RI adalah:

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

Misi Setjen DPR RI adalah:

- 1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Badan Keahlian Setjen DPR RI (BK DPR RI) secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Badan Keahlian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan

kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. BKD memiliki visi yaitu:

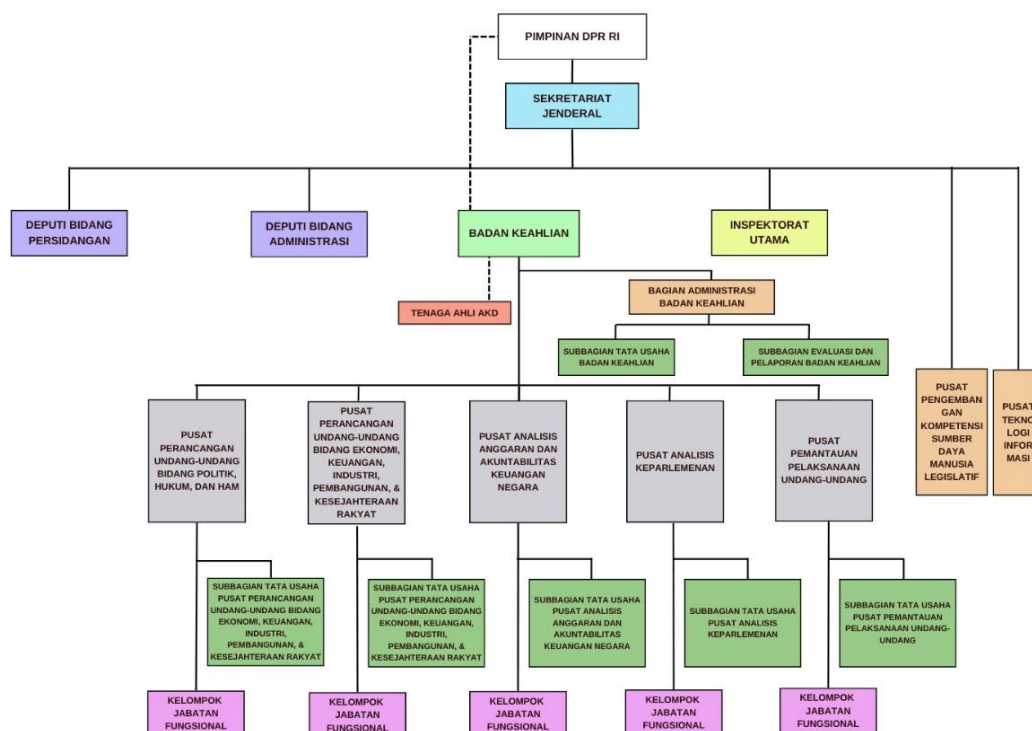
“Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, dan Akuntabel”

BK DPR RI memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
- 2) Menyelenggarakan tata kelola Badan Keahlian DPR RI yang akuntabel dan transparan.

2.2 Struktur Organisasi

Pusat Analisis Keparlemanan merupakan salah satu pusat di lingkungan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

2.3 Tugas dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif yaitu melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.

Adapun fungsi Analis Legislatif ahli pertama terdiri atas:

- 1) melakukan analisis deskriptif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
- 2) melakukan analisis deskriptif substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif;
- 3) melakukan analisis deskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
- 4) melakukan analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
- 5) melakukan analisis deskriptif substansi isu strategis dan/atau aktual;
- 6) mengumpulkan dan mengolah data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual;
- 7) melakukan analisis deskriptif substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk ringkasan isu;
- 8) menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan ringan;
- 9) menelaah substansi dalam prapembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan;
- 10) menelaah substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah;
- 11) menelaah substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
- 12) menelaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
- 13) menelaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
- 14) menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral;
- 15) menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral;

- 16) menelaah substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
- 17) memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
- 18) memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internal unit; dan
- 19) memaparkan dan/atau membahas hasil analisis deskriptif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial.

BAB 3

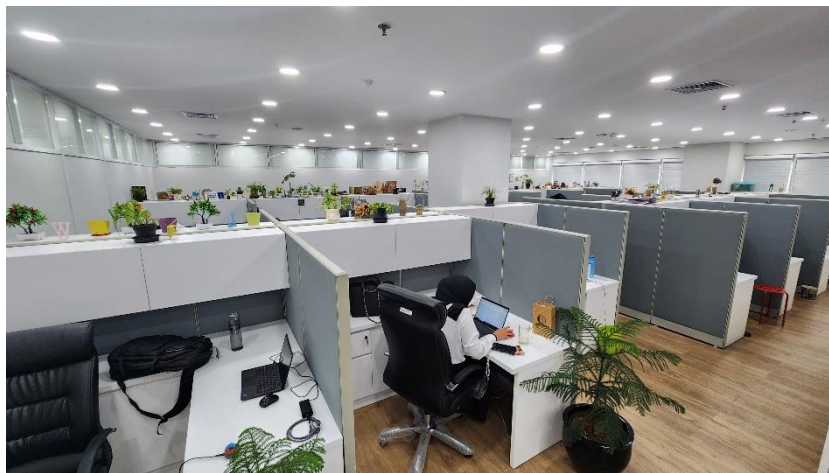
PENETAPAN ISU PRIORITAS

3.1 Identifikasi Isu

Identifikasi isu dilaksanakan dengan pendekatan observasi, diskusi, maupun studi kepustakaan terhadap publikasi terkait seperti laporan kinerja instansi yang terbaru.

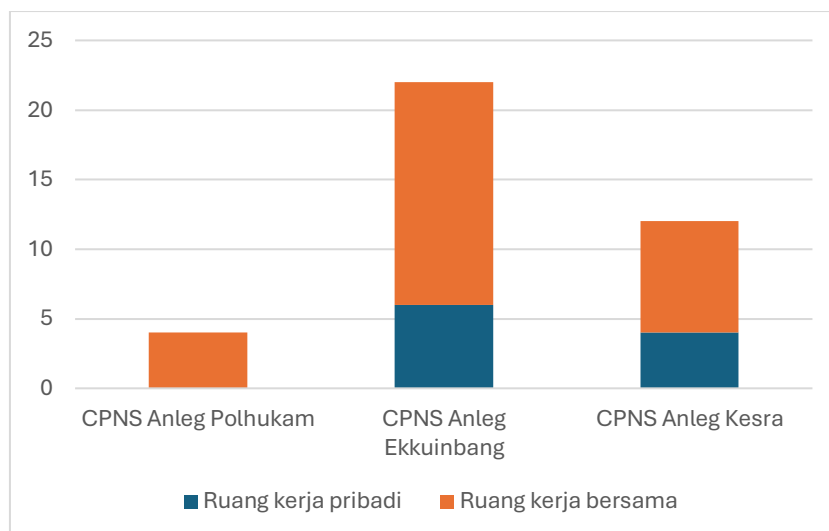
3.1.1 Deskripsi Isu Kesatu

Saya mengidentifikasi isu pertama adalah prasarana ruang kerja bagi CPNS Analis Legislatif Pusat Analisis Keparlemenan (PUSAKA) yang belum memadai. Laporan Kinerja Pusat Analisis Keparlemenan Tahun 2023 yang dipublikasikan pada Januari 2024 memuat isu ini sebagai salah satu permasalahan di unit kerja. Sebanyak 34 orang CPNS Analis Legislatif mulai bertugas sejak 2 Mei 2024 lalu, tetapi ruang kerja bersekat (*cubical office*) yang diperuntukkan untuk analis di lingkungan PUSAKA tidak bisa menampung semua CPNS tersebut.



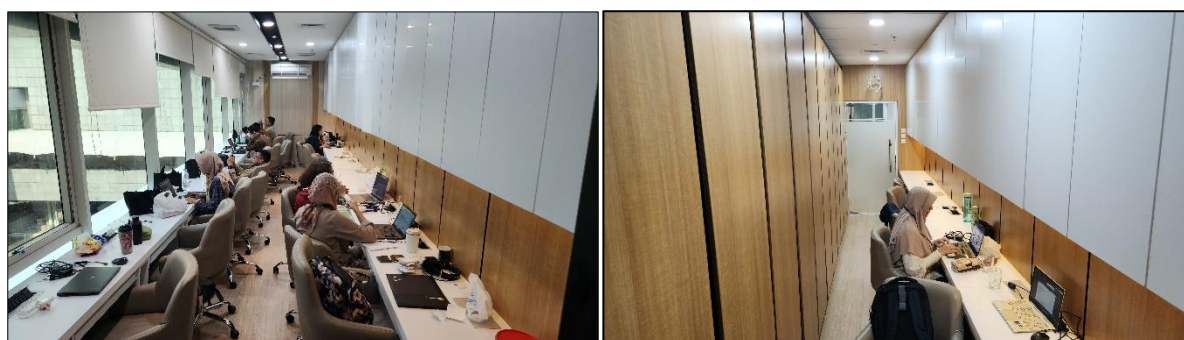
Gambar 2. Ruang Kerja Analis di PUSAKA.

Per tanggal 31 Juli 2024, baru 10 orang CPNS yang sudah memiliki ruang kerja pribadi dengan rincian terdiri dari 6 orang dari 22 orang CPNS Anleg bidang Ekkuinbang, 4 orang dari 8 orang CPNS Anleg bidang Kesra, dan 0 dari 4 orang CPNS Anleg bidang Polhukam. Sebanyak 22 orang CPNS lainnya menempati ruang kantor terbuka berupa lorong memanjang selebar 1,5 – 2,5 meter yang ditata dalam bentuk satu atau dua baris meja. Ruang kerja bersama ini memiliki kapasitas maksimal sebanyak 27 orang dan masing-masing dilengkapi ruang penyimpanan dan koneksi internet kabel.



Gambar 3. Tingkat ketersediaan ruang kerja bagi CPNS Anleg

Ruang yang ditempati oleh CPNS saat ini tidak cukup kondusif terutama ketika mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi dalam waktu lama. Pada sebuah pertemuan daring, suara dari CPNS lainnya dapat terekam bersamaan oleh mikrofon karena jarak antar orang pada ruang kerja bersama tersebut hanya berkisar 50 sentimeter. Oleh karena itu, sebagian CPNS Analis Legislatif memilih melaksanakan pekerjaan di perpustakaan DPR. Diharapkan isu tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga setiap CPNS Analis Legislatif memiliki ruang kerja pribadinya masing-masing.



Gambar 4. Ruang kerja bersama CPNS Analis Legislatif

Keterangan: Kiri = Ruang kerja terbuka bagi CPNS Analis Legislatif yang memuat dua baris meja, Kanan = Ruang kerja terbuka lainnya bagi CPNS Analis Legislatif yang memuat satu baris meja sekaligus akses keluar-masuk bagi ruang kerja terbuka pada gambar kiri.

3.1.2 Deskripsi Isu Kedua

Isu kedua yang saya identifikasi adalah belum tersedianya basis data primer hubungan bilateral keparlemenan di Pusat Analisis Keparlemenan. DPR tidak hanya mengemban fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, namun juga melaksanakan fungsi diplomasi. Saya selaku bagian dari Analis Legislatif di lingkungan Pusat Analisis Keparlemenan berkesempatan pada tanggal 24-26 Juli lalu untuk berpartisipasi sebagai tim materi pada perhelatan agenda rutin Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 di Jakarta.

Berdasarkan pengamatan langsung dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait, penulis mencatat berapa kondisi saat ini terkait isu yang diangkat. Pertama, pada setiap pelaksanaan agenda diplomasi keparlemenan, DPR masih sangat bergantung pada pemerintah (kementerian/lembaga eksekutif) untuk mendapatkan data hubungan bilateral, regional, maupun multilateral antara Indonesia dengan entitas politik internasional lainnya. Biasanya, DPR melalui BKSAP menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memperoleh informasi tersebut yang biasanya berbentuk sebuah dokumen *snapshot*. Lembaran data dan informasi tersebut, sesuai peruntukannya selalu lembaga eksekutif, hampir tidak memuat informasi tentang dinamika hubungan keparlemenan dan dinamika penyelenggaraan fungsi badan legislatif di negara/aktor internasional yang dituju.

[illegible]

Gambar 5. Model Snaphot Hubungan Bilateral versi Kemlu

Pusat Analisis Keparlemenan memiliki basis data dan informasi yang aktual, namun belum terarah untuk menciptakan basis data diplomasi keparlemenan. Ketika PUSAKA diamanatkan untuk mengemban materi pada agenda diplomasi keparlemenan, alih-alih dengan cepat memberdayakan data yang sudah ada, Analisis Legislatif atau analisis kebijakan harus mengeksplorasi data dari awal atau bahkan menunggu data dari kementerian/lembaga lainnya terutama Kemlu. Bidang Polhukam PUSAKA pernah mengagendakan penyusunan dokumen tersebut karena mendesak untuk diperlukan, namun tidak pernah terealisasi akibat keterbatasan kesempatan/waktu para Analisis Legislatif/analisis kebijakan.



Gambar 6. Aktualitas informasi hubungan bilateral pada laman resmi DPR

Keterangan: Kiri = Laporan kunjungan delegasi DPR ke Parlemen Kirgistan pada tahun 2023. Kanan = Info hubungan bilateral Indonesia-Kirgistan yang hanya memuat informasi hingga tahun 2019.

3.1.3 Deskripsi Isu Ketiga

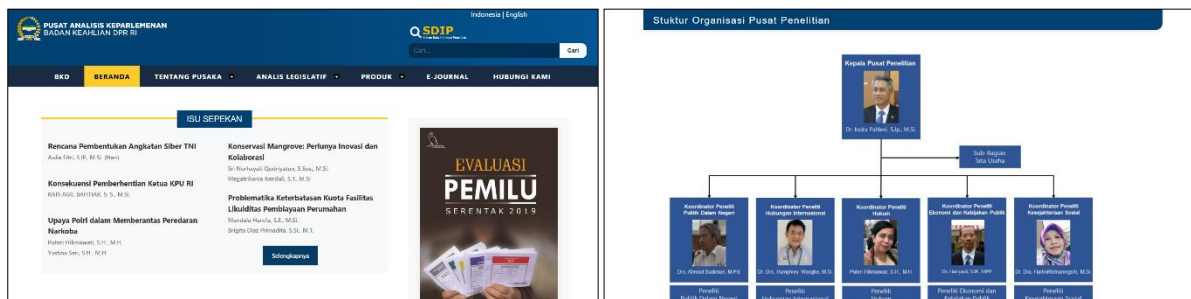
Isu pertama yang saya identifikasi adalah tampilan antar muka laman resmi Pusat Analisis Keparlemenan yang kurang atraktif. Laman resmi (*official webpage*) adalah cerminan sekaligus gerbang suatu organisasi di dunia maya. Meskipun penggunaan media sosial kian populer, laman internet tetap merupakan arsitektur digital terbaik untuk memuat data dan informasi dengan lengkap dan sistematis.

Laman resmi PUSAKA pada alamat tautan pusaka.dpr.go.id secara rutin diperbaharui dengan mencantumkan produk-produk analisis rutin terkini. Jenis informasi yang dimuat juga sudah lengkap mulai dari struktur organisasi hingga profil Analisis Legislatif. Kendati demikian, saya

mengidentifikasi dua hal yang menjelaskan bahwa laman resmi PUSAKA tersebut masih kurang atraktif.

Pertama, beberapa segmen informasi belum diperbaharui, bahkan untuk jangka beberapa tahun. Informasi tentang struktur organisasi sudah tidak diperbaharui sejak tahun 2022. Halaman tentang visi-misi juga masih berupa versi Pusat Penelitian sebelum bertransformasi menjadi Pusat Analisis Keparlemenan.

Kedua, beranda laman resmi PUSAKA terkesan konvensional dan membosankan bagi pengunjung umum yang belum familiar dengan PUSAKA. Judul produk analisis dan analisisnya meramaikan laman beranda hingga ke bagian kaki laman. Ketiadaan tampilan sampul produk analisis atau ilustrasi grafis lainnya menampilkan kesan monoton PUSAKA, yang tentu tidak merepresentasikan rutinitas kerja analis di lingkungan PUSAKA yang dinamis.



Gambar 7. Tampilan beranda dan salah satu muatan informasi pada laman resmi PUSAKA

Keterangan: Kiri = Potret layar beranda laman resmi Pusaka yang diakses pada tanggal 31 Juli 2024.
Kanan = Potret layar informasi tentang struktur organisasi Pusaka yang berbeda dengan realitas struktur organisasi saat ini yang sudah berlaku sejak 2 tahun lalu.

Tabel 1. Matriks Identifikasi dan Deskripsi Isu

No.	Rumusan Isu	Kondisi saat ini	Dampak	Kondisi yang diharapkan	Aspek SMART Governance
1	Prasarana ruang kerja bagi CPNS Analis Legislatif Pusat Analisis Keparlemenan yang belum memadai.	- Hanya 10 orang dari 34 CPNS yang sudah mendapatkan penempatan ruang kerja pribadi. - Ruangan kerja bersama yang tersedia hanya berupa lorong memanjang selebar 1,5 – 2,5 meter dengan kapasitas maksimum untuk 27 orang. Sirkulasi udara sejuk dan kekuatan sinyal jaringan internet kabel tidak merata pada ruangan tersebut.	- Ruang yang ditempati oleh CPNS saat ini tidak cukup kondusif terutama ketika mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi dalam waktu lama. - Sebagian CPNS memilih melaksanakan pekerjaan di Perpustakaan.	Setiap CPNS memiliki ruang/segmen ruangnya masing-masing.	Mengacu pada pasal 2 UU No. 20 tahun 2023, prasarana ruang kerja yang tidak memadai mencerminkan implementasi yang kurang optimal terhadap asas efektivitas, dan efisiensi.
2	Belum tersedianya data primer hubungan bilateral keparlemenan yang sistematis dan komprehensif di Pusat Analisis Keparlemenan	- Tidak ada data primer yang terintegrasi dan termutakhir tentang hubungan bilateral keparlemenan di BKSAP DPR - Tidak ada pangkalan data yang memuat data primer tentang hubungan bilateral keparlemenan di Pusat Analisis Keparlemenan	- Analisis legislatif mengandalkan data sekunder dari lembaga eksekutif untuk mendapatkan data terkait. - Perkembangan hubungan bilateral keparlemenan tidak	PUSAKA memiliki produk analisis berupa <i>parliamentary snapshot</i> yang memuat dengan komprehensif tentang dinamika hubungan bilateral, regional dan multilateral	Mengacu pada pasal 2 UU No. 20 tahun 2023, belum tersedianya data primer di PUSAKA mencerminkan implementasi yang kurang optimal terhadap asas profesionalitas, keterpaduan,

No.	Rumusan Isu	Kondisi saat ini	Dampak	Kondisi yang diharapkan	Aspek SMART Governance
		- Data primer dari Kemlu hampir tidak memuat perkembangan hubungan keparlemenan dan data serta fakta terkait fungsi badan legislatif. - Pusat Analisis Keparlemenan sering kali dilibatkan dan mengemban peran vital dalam forum diplomasi keparlemenan - Upaya pencatatan dan pembaharuan data dan informasi tentang hubungan bilateral keparlemenan bersifat insidental. - Pusat Analisis Keparlemenan pernah berinisiatif menyusun lembaran informasi ringkas namun tidak terlaksana.	terekam dengan baik. Data dan informasi yang diserahkan kepada anggota dewan berpotensi belum diperbaharui dan dimutakhirkan.	keparlemenan yang rutin diperbaharui dan memuat seluruh informasi yang relevan berkaitan dengan fungsi legislatif.	efektivitas, dan efisiensi.
3	Tampilan antar muka laman resmi Pusat Analisis Keparlemenan yang kurang atraktif.	Informasi tentang profil organisasi belum diperbaharui sejak transformasi organisasi dan jabatan pada 2022 lalu.	Pengunjung laman resmi PUSAKA tidak bisa semata-mata mengandalkan laman resmi tersebut untuk mengetahui	Tampilan antar muka laman resmi Pusat Analisis Keparlemenan yang atraktif dan termutakhirkan substansinya.	Mengacu pada pasal 2 UU No. 20 tahun 2023, permasalahan tersebut merefleksikan implementasi asas efektivitas dan

No.	Rumusan Isu	Kondisi saat ini	Dampak	Kondisi yang diharapkan	Aspek SMART Governance
		▪ Tampilan halaman beranda belum menggunakan desain yang kekinian. ▪ Tata letak pada beranda begitu kompleks sehingga relatif sulit bagi pembaca yang belum familiar dengan PUSAKA untuk memahami tentang organisasi PUSAKA.	profil organisasi PUSAKA.		efisiensi yang kurang optimal.

3.2 Penetapan Isu

3.2.1 Penapisan Isu

Dari permasalahan-permasalahan ini penulis mencoba untuk membuat tapisan isu untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi agar dapat difokuskan untuk penyelesaian tantangan-tantangan tersebut. Teknik USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dapat digunakan untuk menyaring dan memprioritaskan isu berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan atau peningkatan dampak dari masalah tersebut. Setiap kriteria diberi skor dari 1 hingga 5 menggunakan skala Likert, di mana 1 adalah yang paling rendah dan 5 adalah yang paling tinggi.

Indikator *urgency* menjelaskan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Indikator *seriousness* menjelaskan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Indikator *growth* menjelaskan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Untuk menentukan nilai setiap kriteria USG dari setiap isu, penulis menggunakan kuesioner yang disebar ke analis di lingkungan PUSAKA, baik yang berstatus PNS maupun CPNS. Setelah data dikumpulkan, penulis menarik nilai modus dari setiap kriteria.

3.2.2 Pemilihan Isu

Untuk menentukan nilai setiap kriteria USG, saya terlebih dahulu menyebarkan kuesioner kepada analis di PUSAKA. Setiap responden mendapatkan empat pertanyaan untuk setiap isu yang diidentifikasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari: (1) apakah isu tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi Analis Legislatif; (2) seberapa mendesak isu tersebut untuk ditindaklanjuti; (3) seberapa serius isu tersebut untuk ditindaklanjuti; dan (4) seberapa besar perkembangan dari isu tersebut di masa mendatang ketika dibiarkan begitu saja tanpa ditindaklanjuti. Pertanyaan kedua hingga keempat dijawab dengan menggunakan skala Likert dari yang paling rendah dengan angka 1 hingga yang paling tinggi angka 5.

Selama pemetaan data melalui kuesioner pada minggu keempat Juli hingga minggu pertama Agustus, empat puluh responden telah memberikan jawaban atas kuesioner. Untuk pertanyaan kesesuaian isu dengan tugas dan fungsi Analis Legislatif, didapatkan jawaban bahwa 30% responden setuju bahwa isu pertama merupakan bagian dari tugas dan fungsi Analis Legislatif, 100% untuk isu kedua, dan 85% untuk isu ketiga.

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar ke analis di lingkungan Pusat Analisis Keparlemenan diperoleh nilai modus tiap kriteria pada masing-masing isu yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. Pengukuran USG tiga isu pada unit kerja

<i>Issue</i>	<i>Urgency</i>	<i>Serious-ness</i>	<i>Growth</i>	<i>Total Score</i>
Prasarana ruang kerja bagi CPNS Analis Legislatif Pusat Analisis Keparlemenan yang belum memadai.	3	3	4	10
Belum tersedianya data primer hubungan bilateral keparlemenan yang sistematis dan komprehensif di Pusat Analisis Keparlemenan	4	4	5	13
Tampilan antar muka laman resmi Pusat Analisis Keparlemenan yang kurang atraktif.	2	3	2	7

Mengacu pada hasil pengukuran dengan menggunakan teknik USG, maka isu yang dipilih dan dilanjutkan untuk dibahas adalah isu tentang: *Belum tersedianya data primer hubungan bilateral keparlemenan yang sistematis dan komprehensif di Pusat Analisis Keparlemenan*

3.3 Analisis Isu

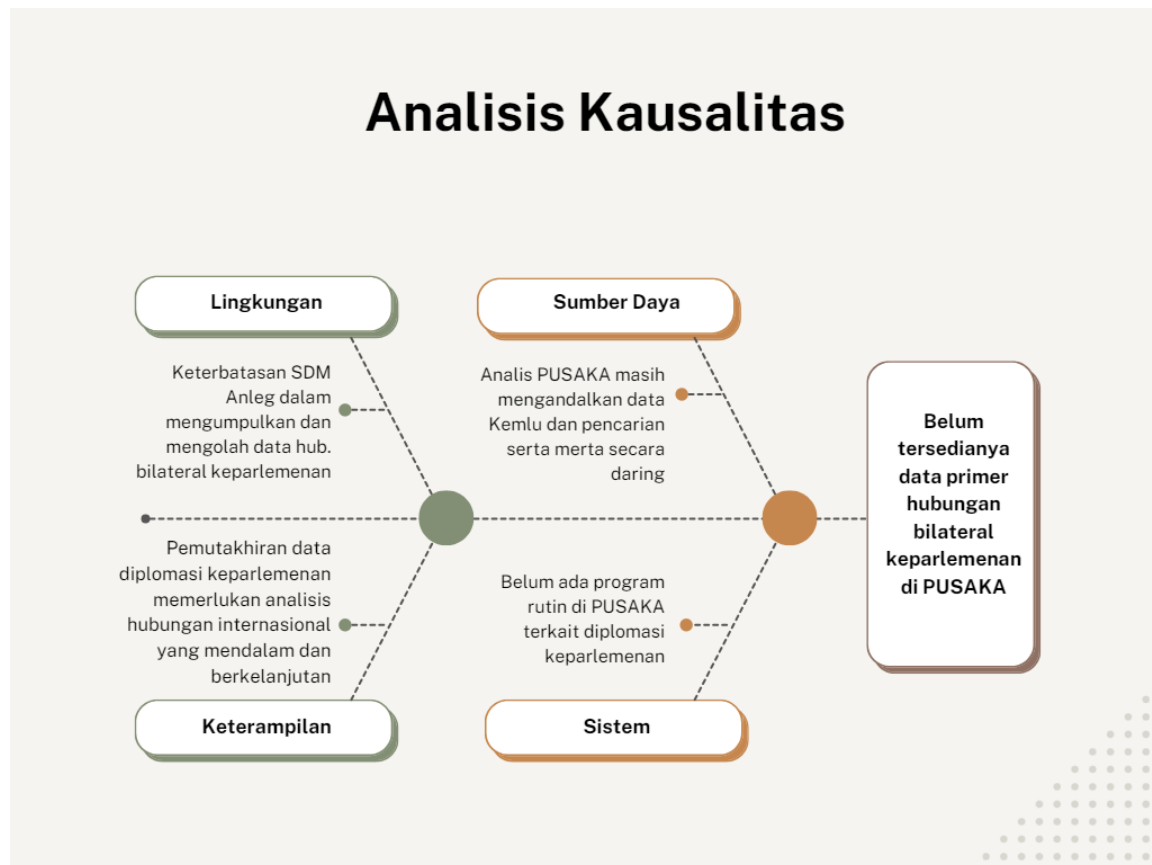
3.3.1 Analisis Kausalitas

Pada bagian ini diuraikan penyebab dari munculnya isu yang dibahas. Teknik analisis yang dipergunakan untuk membantu menjelaskan penyebab isu tersebut adalah *fishbone diagram*. Teknik ini menandakan pada hubungan sebab akibat yang dikategorisasikan berdasarkan cabang-cabang atau aspek-aspek yang relevan dengan jenis masalah. Penyebab masalah pada tulisan ini dibagi kedalam 4 kategori, yaitu: lingkungan (*surrounding*), keterampilan (*skill*), sistem (*system*), dan pemasok/sumber daya (*supplier*). Dengan menggunakan teknik analisis di atas, diuraikan penyebab masalah utama (*core issue*) sebagai berikut:

- Aspek *surrounding*: Ketersediaan sumber daya manusia di PUSAKA relatif terbatas untuk menangani dan mengimprovisasi lebih banyak produk analisis dan asistensi. Beban kerja Analis Legislatif saat ini sudah sangat tinggi. Disamping itu, peran PUSAKA yang belum signifikan dalam setiap agenda diplomasi keparlemenan. Tidak seluruh pertemuan atau agenda diplomasi keparlemenan melibatkan PUSAKA. Badan Kerja Sama Antar Parlemen

(BKSAP) DPR RI juga masih memegang peranan sentral dalam pencatatan dan pengumpulan substansi bahasan diplomasi keparlemenan.

- Aspek *supplier*: Analisis di lingkungan PUSAKA masih mengandalkan lembaran snapshot Kemlu dan pencarian daring secara serta merta sebagai upaya pengumpulan data untuk menyusun rumusan substansi suatu agenda diplomasi keparlemenan.
- Aspek *skill*: Penyediaan data primer diplomasi bilateral keparlemenan membutuhkan analisis yang mendalam dan berkelanjutan dalam bidang hubungan internasional. Di saat yang sama, belum banyak analisis di lingkungan PUSAKA yang berkesempatan mengeksekusi keterampilan atau pengalamannya dalam hal tersebut.
- Aspek *system*: PUSAKA memiliki sejumlah keragaman yang tinggi dalam hal produk analisis. Kendati demikian, belum ada program analisis, asistensi, dan ekspose secara rutin menyangkut dukungan fungsi diplomasi keparlemenan di PUSAKA.



Gambar 8. Diagram *fishbone* analisis isu utama

3.3.2 Analisis Situasi

Formulasi gagasan pemecahan isu juga mempertimbangkan hasil analisis SWOT secara kualitatif. Gagasan pemecahan isu yang kami tawarkan akan mengeliminasi kelemahan dan ancaman yang mengemuka dan memberikan nilai tambah pada kekuatan dan peluang yang dimiliki. Berikut adalah hasil analisis SWOT secara kualitatif dalam formulasi gagasan pemecahan isu:

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1. PUSAKA memiliki beragam produk analisis yang bisa menjadi sumber data teraktual. 2. Tupoksi Analis Legislatif merupakan kompetensi yang paling dibutuhkan dalam menyusun data primer diplomasi bilateral keparlemenan	1. Masih bergantung pada sumber data dari eksekutif (pemerintah). 2. Belum ada program atau publikasi rutin PUSAKA yang secara spesifik berkenaan dengan dukungan fungsi diplomasi DPR	1. BKD sering melibatkan PUSAKA dalam agenda diplomasi keparlemenan 2. PUSAKA memiliki jenis publikasi rutin baru yaitu <i>Foreign Legislation Analysis</i> yang punya korelasi erat dalam menjawab isu tersebut.	1. PUSAKA merupakan “otak” lembaga legislatif namun tidak memiliki basis data primer tentang hubungan internasional keparlemenan. 2. Peran PUSAKA dalam setiap agenda diplomasi keparlemenan belum signifikan yang diharapkan bila dikaitkan dengan kapabilitas dan kapasitasnya.

3.4 Pemecahan Isu

Isu utama yang dibahas pada aktualisasi ini memerlukan gagasan pemecahan yang relevan dengan implementasi *smart governance* ASN. Gagasan pemecahan yang demikian harus berangkat dari prinsip yang juga dinamakan “SMART” yang merupakan akronim dari *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*. SMART adalah metode perencanaan langkah atau gagasan pemecahan isu yang digunakan untuk menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. SMART merupakan akronim dari *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Relevan), dan *Time-bound* (Berkas Waktu). Dengan menggunakan strategi SMART, tujuan yang ditetapkan akan lebih terarah, dapat diukur,

realistis, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan.

Berdasarkan deskripsi isu, rumusan isu, dan uraian penyebab, maka gagasan pemecahan isu yang kami formulasikan adalah: **menyusun *Parliamentary Snapshot***. *Parliamentary Snapshot* merupakan sebuah lembaran informasi yang memuat data ringkas tentang hubungan diplomatik Indonesia dengan suatu negara atau organisasi internasional dengan fokus pencatatan jejak rekam diplomasi antar parlemen dan data-data lainnya seperti isu aktual keparlemenan di negara setempat. Model ini diadopsi dari Kemlu yang juga menyediakan *snapshot* sebagai data primer yang sistematis dan komprehensif untuk utamanya mendukung kegiatan diplomasi di ranah eksekutif. *Parliamentary Snapshot* sangat berguna di setiap agenda diplomasi anggota dewan seperti kunjungan luar negeri atau menerima *courtesy call* dari pejabat asing.

Pembaharuan dan pemutakhiran *Parliamentary Snapshot* relatif tidak mendisrupsi linimasa agenda kerja PUSAKA karena dilaksanakan secara paralel dengan agenda yang sudah *established* di Pusaka. Oleh karena itu, eksistensi *Parliamentary Snapshot* di lingkungan PUSAKA akan bersifat rutin, bukan hanya saat sebuah agenda diplomasi keparlemenan diselenggarakan. *Parliamentary Snapshot* juga akan disediakan baik secara daring maupun luring. Versi daring dari *parliamentary snapshot* akan dimuat pada aplikasi Simfoni DPR. Dengan demikian, *parliamentary snapshot* akan berfungsi ganda, baik sebagai *stand alone file*, maupun sebagai *database* yang bermanfaat tidak hanya untuk urusan hubungan bilateral keparlemenan, tetapi seluruh bidang pada PUSAKA.

Alur kerja penyusunan *parliamentary snapshot* secara rutin dimulai dari pembentukan tim kerja beranggotakan analis legislatif lintas bidang di Pusat Analisis Keparlemenan. Langkah berikutnya, tim kerja mengumpulkan data dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal terdiri dari publikasi rutin PUSAKA, laporan agenda diplomasi keparlemenan, bahan kepustakaan daring maupun luring di lingkungan DPR, Sedangkan sumber eksternal berasal dari data-data yang dikelola oleh kementerian/lembaga. Tahap berikut, tim kerja akan menuangkan mensortir dan menempatkan data-data tersebut kedalam tabel atau matriks *parliamentary snapshot*. Setelah data divalidasi kembali, *parliamentary snapshot* dapat disimpan oleh PUSAKA sebagai data primer, diunggah ke Simfoni atau pangkalan data daring lainnya, dan diserahkan kepada penerima manfaat yakni anggota dewan maupun alat kelengkapannya seperti BKSAP.

Tabel 3. Aspek SMART dari gagasan *Parliamentary Snapshot*

Indikator SMART	Deskripsi gagasan pemecahan isu
<i>Specific</i>	Menyusun <i>Parliamentary Snapshot</i>
<i>Measureable</i>	Penyusunan <i>Parliamentary Snapshot</i> dapat diukur berdasarkan jumlah negara yang menjadi sasaran analisis
<i>Achievable</i>	<i>Parliamentary Snapshot</i> hanya berupa lembaran ringkas dan berkorelasi dengan publikasi rutin PUSAKA
<i>Relevant</i>	<i>Parliamentary Snapshot</i> secara substantif merupakan produk analisis di PUSAKA.
<i>Time-bound</i>	Penyusunan templat <i>Parliamentary Snapshot</i> hanya membutuhkan satu hari kerja. Data dapat dimuat secara berkala oleh Analis Legislatif di PUSAKA

BAB 4

RANCANGAN AKTUALISASI

4.1 Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI
Identifikasi Isu	: 1. Prasarana Ruang Kerja bagi CPNS Analis Legislatif yang belum memadai 2. Belum tersedianya data primer hubungan bilateral keparlemenan yang sistematis dan komprehensif di Pusat Analisis Keparlemenan 3. Tampilan antar muka laman resmi Pusat Analisis Keparlemenan yang kurang atraktif.
Isu yang Diangkat	: Belum tersedianya data primer hubungan bilateral keparlemenan yang sistematis dan komprehensif di Pusat Analisis Keparlemenan
Gagasan Pemecahan Isu	: Penyusunan <i>Parliamentary Snapshot</i>

Tabel 4 Matriks Rancangan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan dengan Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemetaan data	Penyebaran kuesioner pemilihan isu	Jawaban responden tentang isu prioritas di PUSAKA	Berorientasi pelayanan. Penyebaran kuesioner merupakan instrumen	Networking. Pengumpulan data melalui kuesioner membutuhkan jaringan	Mendukung misi PUSAKA untuk mengoptimalkan dukungan keahlian

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan dengan Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
				untuk memahami dan memenuhi kebutuhan anggota dewan sebagai penerima manfaat pelayanan PUSAKA	yang baik dan luas dengan para responden.	melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel
		Konsultasi dengan mentor dan analis senior di PUSAKA	Rancangan aktualisasi final, rekomendasi metode dan objek pengumpulan data, dan rancangan model produk akhir	Kolaboratif. Konsultasi dengan mentor merupakan perwujudan sikap terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah,	Integritas. Menginisiasi rangkaian kegiatan aktualisasi sesuai prosedur merupakan cerminan integritas seorang CPNS.	Mendukung misi PUSAKA untuk melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal
		Studi kepustakaan tentang penyusunan <i>parliamentary snapshot</i>	Daftar jenis informasi dan data yang akan dimuat pada <i>parliamentary snapshot</i>	Kompeten. Pemetaan data secara mendalam melalui studi kepustakaan merupakan cerminan dari sikap melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.	Profesionalisme. Prinsip profesional dalam menyusun aktualisasi diterapkan melalui pemanfaatan instrumen akademik sejak awal.	Mendukung misi PUSAKA untuk mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel
2	Pengumpulan data	Wawancara dengan analis di lingkungan PUSAKA yang	Catatan hasil wawancara tentang penyusunan <i>parliamentary</i>	Adaptif. Menggunakan pendekatan wawancara	Profesionalisme. Eksplorasi data secara komprehensif melalui wawancara	Mendukung misi PUSAKA dalam mengoptimalkan dukungan keahlian

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan dengan Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
		berpengalaman dalam agenda diplomasi keparlemenan	<i>snapshot</i> yang khususnya memuat informasi tentang kapabilitas serta kapasitas PUSAKA sebagai penyusun <i>parliamentary snapshot</i>	merupakan wujud sikap bertindak proaktif.	memerlukan profesionalitas dalam menyusun butir wawancara dan teknis wawancara.	melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel.
		Wawancara dengan pegawai di lingkungan BKSAP	Catatan hasil wawancara tentang penyusunan <i>parliamentary snapshot</i> , khususnya memuat informasi tentang model <i>parliamentary snapshot</i> yang paling mampu memaksimalkan fungsi asistensi dan ekspose Analis Legislatif dalam mendukung fungsi diplomasi keparlemenan.	Kolaboratif. Menggandeng pihak diluar unit kerja untuk pengumpulan data merupakan bentuk sikap memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.	Networking. Mengumpulkan data dari instansi diluar tempat bekerja membutuhkan jaringan kerja yang luas dan mapan.	Mendukung misi PUSAKA untuk mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan dengan Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
		Studi kepustakaan tentang hubungan bilateral keparlemenan Indonesia	Data dan informasi yang berkenaan dengan hubungan bilateral keparlemenan Indonesia dengan sejumlah negara.	Kolaboratif. Mendayagunakan beragam literatur dalam pengumpulan data merupakan cerminan perilaku menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.	IT dan bahasa asing. Koleksi data diplomasi keparlemenan membutuhkan kompetensi berbahasa asing agar didapatkan data yang teraktual dan relevan.	Mendukung misi PUSAKA dalam mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel.
3	Pengolahan data	Penyusunan matriks data <i>parliamentary snapshot</i>	Matriks atau tabel <i>parliamentary snapshot</i>	Adaptif. Menggunakan matriks dalam memvisualisasi data merupakan bentuk sikap terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.	Profesionalisme. Desain matriks yang representatif dan atraktif memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memahami isu yang dibahas	Mendukung misi PUSAKA dalam melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal
		Penempatan data dan informasi sesuai kategori	Matriks atau tabel <i>parliamentary snapshot</i> yang sudah terisi data	Kompeten. Menyajikan data yang sudah terkumpul kedalam matriks merupakan realisasi sikap melaksanakan	Wawasan global. Hampir seluruh data pada <i>parliamentary snapshot</i> merupakan fakta yang berasal dari luar negeri dan hanya akan didapatkan jika	Mendukung misi PUSAKA dalam memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan dengan Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
				tugas dengan kualitas terbaik.	memiliki wawasan global yang mumpuni.	
4	Penyajian data	Mengunggah <i>parliamentary snapshot</i> versi daring ke Simfoni atau media pangkalan data daring lainnya.	Unggahan <i>parliamentary snapshot</i>	Adaptif. Memanfaatkan wahana digital untuk menyebarluaskan produk analisis merupakan cerminan sikap adaptif terhadap perkembangan teknologi.	IT dan bahasa asing. Mendayagunakan media digital untuk mempermudah dan memperluas jangkauan ekspose <i>parliamentary snapshot</i>	Mendukung misi PUSAKA dalam memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel
		Finalisasi laporan, sampel <i>Parliamentary Snapshot</i> , dan paparan laporan	Laporan aktualisasi, paparan laporan aktualisasi, dan <i>parliamentary snapshot</i>	Akuntabel. Menuntaskan laporan aktualisasi merupakan perwujudan sikap melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi	Integritas. Pengejawantahan integritas tertinggi dalam rangkaian latsar CPNS adalag menyelesaikan laporan aktualisasi beserta lampiran pendukungnya dengan tepat waktu dan tepat guna.	Mendukung misi PUSAKA dalam mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan dengan Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
		Pemaparan sampel <i>Parliamentary Snapshot</i> dihadapan BKSAP dan Analisis Pusaka	Testimoni BKSAP dan Analisis di lingkungan PUSAKA	Berorientasi pelayanan. Memaparkan gagasan yang telah direalisasikan kepada penerima manfaat sekaligus mendengarkan testimoninya merupakan realisasi sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan,	Hospitality. Agar inovasi <i>Parliamentary Snapshot</i> tersampaikan dengan baik kepada penerima manfaat layanan keahlian yang kita berikan, maka prinsip keramahan perlu dikedepankan.	Mendukung misi PUSAKA untuk melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal

4.2 Jadwal

Pelaksanaan aktualisasi latsar sejak tahap persiapan hingga pengakhiran berlangsung mulai tanggal 29 Juli 2024 – 5 Oktober 2024.

Tabel 5. Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JULI	AGUSTUS				SEPTEMBER				OKT
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pemetaan data	Konsultasi dengan mentor dan analis senior di PUSAKA										
	Penyebaran kuesioner pemilihan isu										
	Studi kepustakaan tentang penyusunan <i>parliamentary snapshot</i>										
Pengumpulan data	Wawancara dengan analis di lingkungan PUSAKA yang berpengalaman dalam agenda diplomasi keparlemenan										
	Wawancara dengan personel di lingkungan BKSAP										
	Studi kepustakaan tentang hubungan bilateral keparlemenan Indonesia										
Pengolahan data	Penyusunan matriks data <i>parliamentary snapshot</i>										

	Penempatan data dan informasi sesuai kategori										
Penyajian data	Mengunggah <i>parliamentary snapshot</i> versi daring ke Simfoni atau media pangkalan data daring lainnya										
	Pemaparan sampel <i>Parliamentary Snapshot</i> dihadapan Analis PUSAKA dan personel BKSAP (tentatif).										
	Finalisasi laporan, sampel <i>Parliamentary Snapshot</i> , dan paparan laporan										

BAB 5

PELAKSANAAN AKTUALISASI

5.1 Deskripsi Pelaksanaan

5.1.1 Pelaksanaan Pemetaan Data

Kegiatan pertama pada pelaksanaan aktualisasi ini adalah pemetaan data. Kegiatan tersebut dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu: konsultasi dengan mentor dan analis senior di PUSAKA, penyebaran kuesioner pemilihan isu, dan studi kepustakaan tentang *penyusunan parliamentary snapshot*.

Pelaksanaan Tahapan Kesatu

Penulis melakukan konsultasi dengan mentor, *coach*, dan analis senior di PUSAKA dalam rangka menghimpun informasi tentang isu yang paling mengemuka dan paling berdampak bagi analis legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-harinya atau bagi PUSAKA sebagai sebuah unit kerja yang memberikan dukungan keahlian bagi anggota dewan.

Pelaksanaan Tahapan Kedua

Penulis meminta pendapat para analis baik analis legislatif maupun analis kebijakan di lingkungan PUSAKA tentang isu yang paling relevan untuk diangkat menjadi topik aktualisasi. Proses ini dilaksanakan dengan menebar kuesioner selama dua minggu.

Pelaksanaan Tahapan Ketiga

Penulis menelaah isu-isu yang menjadi perhatian bagi PUSAKA melalui laporan kinerja tahunan terbaru baik yang dipublikasikan oleh PUSAKA sendiri maupun oleh Badan Keahlian selaku instansi induk PUSAKA. Penulis juga mencari tahu dinamika pelaksanaan fungsi analis legislatif di PUSAKA dengan membaca beberapa buku terbitan analis legislatif senior.

5.1.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama pasca seminar rancangan aktualisasi. Kegiatan ini terdiri dari dua tahapan wawancara dan satu tahapan studi kepustakaan.

Pelaksanaan Tahapan Kesatu

Penulis melaksanakan wawancara dengan analis senior di PUSAKA yang berpengalaman dalam kegiatan diplomasi keparlemenan. Wawancara tidak terstruktur telah terselenggara

ketika penulis terlibat langsung dalam perhelatan *Indonesia-Pacific Parliamentary Forum* ke-2 pada akhir Juli lalu. Pada tahapan kedua, penulis kembali mewawancarai analis senior yakni Analis Legislatif Ahli Madya Bapak Teddy Prasetyawan dan Analis Legislatif Ahli Madya Ibu Yulia Indarsih. Disamping sebagai mentor, penulis juga mewawancarai Bapak Simela Victor Muhammad yang mempunyai pengalaman sangat luas dalam kegiatan diplomasi keparlemenan sekaligus merupakan pakar hubungan internasional di Pusat Analisis Keparlemenan.



Gambar 9. Wawancara penulis dengan Analis Legislatif Ahli Madya Teddy Prasetyawan



Gambar 10. Wawancara penulis dengan Analis Legislatif Ahli Madya Yulia Indahri

Bahasan wawancara meliputi: (1) arti penting penguasaan data primer diplomasi keparlemenan di PUSAKA; (2) pengalaman PUSAKA dalam mendukung anggota dewan dan AKD melaksanakan fungsi diplomasi keparlemenan; dan (3) uraian informasi yang relevan untuk ditampilkan dalam sebuah *parliamentary snapshot*.

Pelaksanaan Tahapan Kedua

Tahapan kedua pada pelaksanaan kegiatan pengumpulan data adalah melakukan wawancara ke pejabat atau pegawai BKSAP selaku alat kelengkapan DPR yang paling bertanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi diplomasi keparlemenan. Aspek *parliamentary snapshot* utamanya dipergunakan pada perhelatan bilateral. Oleh karena itu, pada tahapan ini penulis mewawancarai Kepala Bagian Kerja Sama Bilateral BKSAP Ibu Iis Muldiyanti, S.Sos., M.M.

Penulis menerima berbagai bahan dalam bentuk cetak maupun non cetak yang bisa dijadikan dasar penyusunan sebuah *parliamentary snapshot*. Kepada penulis, Ibu Iis Muldiyanti menerangkan beberapa poin sebagai berikut: (1) kegiatan diplomasi keparlemenan sangat intensif diselenggarakan di BKSAP, namun pembaharuan datanya kerap terlambat akibat keterbatasan sumber daya; (2) BKSAP mengandalkan pegawai tidak tetap, yaitu tenaga ahli, untuk menelaah, menganalisis, ekspose, dan memperbaharui data diplomasi keparlemenan disamping tugas utama mereka dalam memberikan dukungan teknis dan administratif; (3) sumber utama untuk pengumpulan, penelaahan, dan pembaharuan data primer diplomasi keparlemenan berasal dari lembaga eksekutif, terutama Kemlu, disamping data serta-merta yang diperoleh secara mandiri; (4) sinergi dan kolaborasi penyelenggaraan dukungan fungsi diplomasi keparlemenan antara BKSAP dan PUSAKA relatif terbatas dan mayoritas cenderung personal antara analis legislatif terkait dengan BKSAP; (5) Ibu Iis Muldiyanti mengapresiasi inisiatif program aktualisasi latsar yang menysasar fungsi diplomasi keparlemenan yang sangat jarang dialami dibandingkan tiga fungsi utama DPR lainnya; (6) Ibu Iis Muldiyanti siap memberikan dukungan data primer kepada Pusat Analisis Keparlemenan bila bersedia mendukung pemutakhiran data diplomasi keparlemenan; dan (7) ada banyak potensi kapabilitas dan kapasitas PUSAKA yang bisa diimplementasikan di masa mendatang apabila PUSAKA memiliki basis data primer dan olahan yang memadai.



Gambar 11. Wawancara penulis dengan Kabag Kerja Sama Bilateral Iis Muldiyanti

Pelaksanaan Tahapan Ketiga

Tahapan ketiga dalam kegiatan pengumpulan data adalah melaksanakan studi kepustakaan. Penulis menemukan sejumlah publikasi baik oleh anggota DPR RI maupun oleh Alat Kelengkapan Dewan yang memuat tentang tantangan dan perkembangan diplomasi keparlemenan DPR RI. Penulis menarik informasi yang relevan dari sumber-sumber kepustakaan tersebut untuk sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kategori atau jenis data yang relevan untuk dituangkan dalam *parliamentary snapshot*.



Gambar 12. Penulis melakukan studi kepustakaan untuk data *parliamentary snapshot*

5.1.3 Pelaksanaan Pengolahan Data

Pelaksanaan Tahapan Kesatu

Tahapan pertama dalam kegiatan pengolahan data adalah penyusunan matriks data *parliamentary snapshot*. Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi poin data apa saja yang relevan dituangkan dalam sebuah *parliamentary snapshot*. Dengan demikian, sebuah

parliamentary snapshot mampu merepresentasikan kebutuhan data yang lengkap tetapi tidak berlebihan untuk mengurangi makna sebagai sebuah “*snapshot*”. Produk langsung dari tahapan ini adalah sebuah templat *parliamentary snapshot*.

Pelaksanaan Tahapan Kedua

Tahapan kedua pada kegiatan pengolahan data adalah penempatan data sesuai kategori atau jenis data yang telah dirumuskan pada tahapan pertama di atas. Tahapan ini membutuhkan penelaahan dan analisis agar dapat ditampilkan data tepat dan ringkas. Selain itu dibutuhkan proses konfirmasi data dari sumber lainnya agar data yang ditampilkan tepat dan ringkas.

Untuk menyusun, memperbaharui, dan memutakhirkan data pada setiap *parliamentary snapshot*, maka perlu tim yang beranggotakan analis legislatif, dapat juga menyertai analis kebijakan, di lingkungan PUSAKA yang akan atau memang ditugaskan untuk mendukung kegiatan diplomasi keparlemenan. Upaya pengumpulan dan pengolahan data dapat dibebankan pada analis legislatif ahli pertama, tetapi rancangan *parliamentary snapshot* akan diperiksa oleh analis legislatif ahli muda atau madya sebelum difungsikan atau dibagikan kepada alat kelengkapan dewan terkait. Tim analis yang sudah ditunjuk, dapat memutakhirkan data tersebut baik saat persiapan penyelenggaraan sebuah kegiatan diplomasi pertahanan maupun dilaksanakan rutin sehari-hari sebagai bagian dari tugas. Ketiga, penyusunan *parliamentary snapshot* dapat disimpan sebagai bagian dari arsip atau diberikan kepada penyelenggara sesuai permintaan seperti BKSAP.

Tabel 6. Matriks Pengolahan Data *Parliamentary Snapshot*

No.	Data	Sub-Data	Deskripsi	Tujuan	Sumber Data	Pengisian Data
1	Profil Ringkas	▪ Identitas ▪ Pimpinan negara ▪ Kependudukan ▪ Wilayah ▪ Ekonomi Makro	Berisikan informasi dasar tentang sebuah negara yang mayoritas berupa data statistik seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan pendapatan domestik bruto.	1) Menjadi pengantar bagi pembaca untuk mengenali negara tujuan	1) The World Factbook 2) World Bank Data	1) Nama negara dituliskan dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa resmi negara sasaran. 2) Penyebutan nama pejabat diawali dengan kata panggilan. 3) Statistik kependudukan hanya meliputi tiga datum terbesar. 4) Luas wilayah suatu negara meliputi luas wilayah darat dan lautnnya.
2	Hubungan Bilateral	▪ Sejarah ▪ Pejabat terkait ▪ Kepentingan nasional ▪ Forum bilateral	Berikan data mengenai hubungan bilateral suatu negara dengan Indonesia. Bagian ini tidak memuat data mengenai implementasi hubungan bilateral antar badan legislatif.	1) Memberikan gambaran umum capaian hubungan bilateral antar pemerintahan Indonesia dan negara sasaran.	1) Laman resmi Kemlu 2) Data Ekspor Impor Nasional Badan Pusat Statistik	1) Uraian tentang kepentingan terhadap satu sama lain dapat berasal dari pernyataan resmi Kemlu atau analisis oleh penulis dengan mempelajari perkembangan terkini.

3	Profil Parlemen	▪ Struktur parlemen ▪ Komposisi parlemen ▪ Pejabat terkait	Bagian ini memuat data tentang gambaran umum badan legislatif di suatu negara,	1) Memberikan informasi ringkas tentang badan legislatif di negara sasaran	1) IPU Parline	1) Apabila suatu negara memiliki badan legislatif dengan dua kamar, maka pada bagian ini uraian data yang lebih mendetail diperuntukkan pada majelis rendah karena ekuivalen dengan DPR RI.
4	Hubungan Bilateral Keparlemen	▪ Pertemuan bilateral ▪ Forum internasional keparlemen	Bagian ini menginventarisasi daftar pertemuan bilateral antara anggota parlemen Indonesia dengan suatu negara. Bagian ini juga menginventarisasi forum-forum internasional keparlemen yang mana baik Indonesia maupun negara tujuan menjadi anggota atau partisipan.	1) Menggambar-kan intensitas saling kunjung antar anggota parlemen kedua negara 2) Memastikan perkembangan diskusi antar parlemen kedua negara terinformasikan dengan baik	1) Data BKSAP DPR RI dan publikasi media cetak dan sosial DPR RI	1) Data pertemuan bilateral mencakup, waktu pelaksanaan, anggota delegasi dari kedua negara, dan agenda pertemuan.
5	Isu Aktual	▪ Isu di bidang Polhukam ▪ Isu di bidang Ekuinbang	Bagian ini memuat isu-isu yang menonjol atau menjadi perhatian global dan Indonesia.	1) Menjadi sumber kepustakaan bagi penyusun materi diplomasi	1) Media lokal dan global. 2) Tulisan-tulisan analisis isu	1) Hanya menampilkan isu menonjol dan berdampak nasional 2) Jika memungkinkan, dapat diuraikan setiap isu

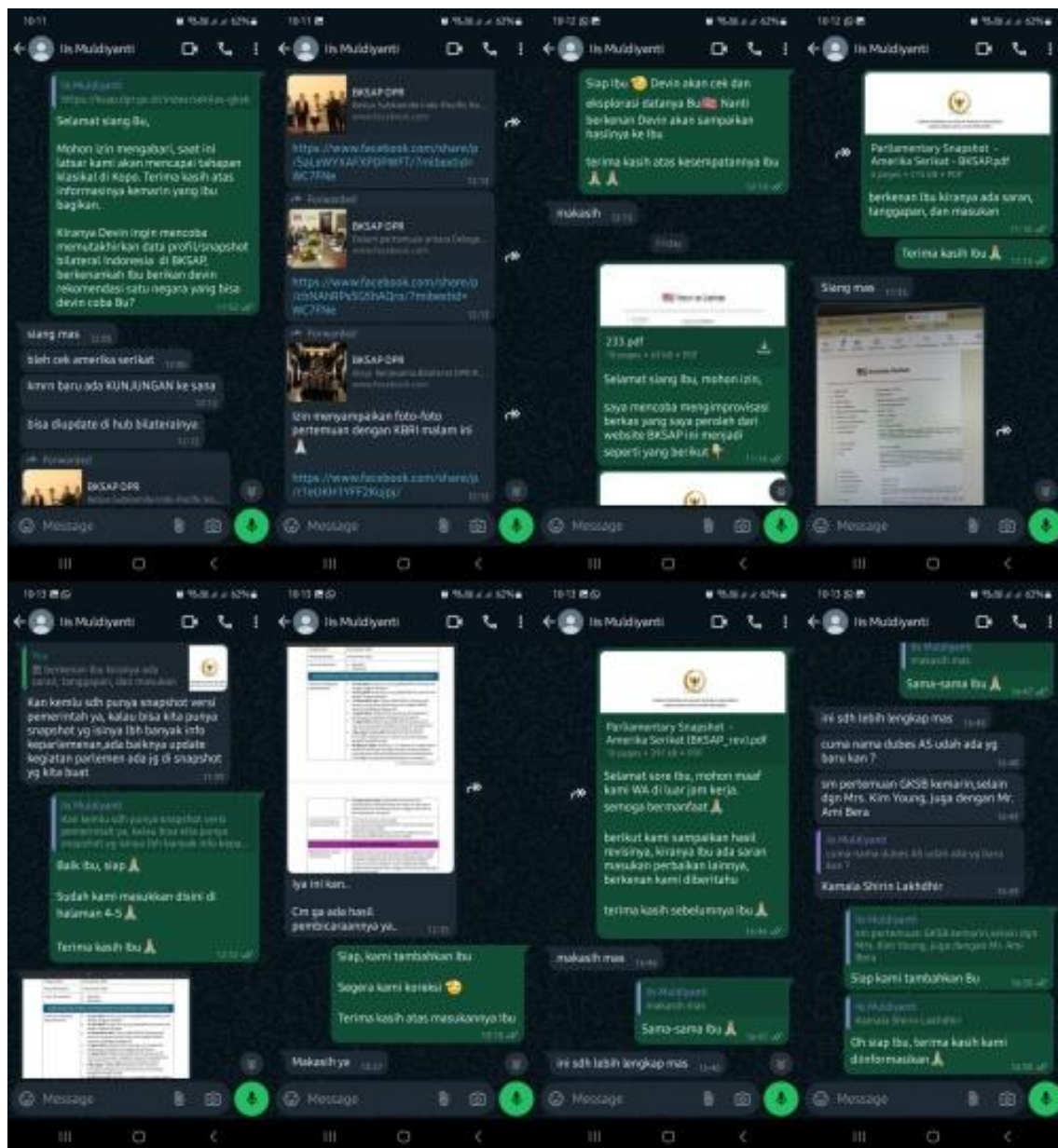
		▪ Isu di bidang Kesra	Pemilihan jenis isu berdasarkan tiga bidang yang terdapat di PUSAKA.	keparlemenan seperti data tentang kepentingan bersama, isu yang menjadi perhatian bersama, dan potensi kerja sama yang bisa diusulkan oleh DPR.	di negara sasaran	yang berkenaan dengan lingkup komisi-komisi di DPR RI.
--	--	---	---	--	--------------------------	---

5.1.4 Pelaksanaan Penyajian Data

Pelaksanaan Tahapan Kesatu

Tahapan pertama dari kegiatan penyajian data adalah mengunggah *parliamentary snapshot* versi daring ke Simfoni atau media pangkalan data daring lainnya. Berdasarkan hasil diskusi dengan mentor dan wawancara, mekanisme yang paling disarankan untuk menjalankan tahapan ini adalah dengan mengirimkan salinan berkas *parliamentary snapshot* ke BKSAP untuk kemudian dapat diunggah oleh BKSAP di laman resminya. Tujuan dari mekanisme adalah: (1) mencegah duplikasi pangkalan data *snapshot* hubungan bilateral keparlemenan; (2) menciptakan kolaborasi yang berkesinambungan antara PUSAKA dengan anggota DPR dan BKSAP selaku alat kelengkapannya; (3) menjadi manifestasi nyata analisis legislatif dalam memberikan manfaat layanan keahliannya kepada anggota DPR beserta AKD-nya; (4) memperluas cakupan ekspose produk analisis Analisis Legislatif; dan (5) membuka lebih banyak ruang dan partisipasi untuk mengimprovisasi *parliamentary snapshot*.

Berdasarkan pengamatan serta keterangan baik dari lingkungan PUSAKA maupun BKSAP, *parliamentary snapshot* menawarkan peningkatan tampilan dan pembaharuan data yang signifikan dibandingkan berkas serupa yang terpublikasikan di laman resmi BKSAP. Berkas *parliamentary snapshot* juga dapat diarsipkan dengan format *portable document format* (pdf) yang menjadi format umum informasi bilateral di laman resmi BKSAP.



Gambar 13. Potret Layar percakapan penulis dengan Kabag Kerja Sama Bilateral BKSAP



Gambar 14. Improvisasi lembar informasi BKSAP melalui *parliamentary snapshot*

Pelaksanaan Tahapan Kedua

Tahapan kedua adalah mensosialisasikan beberapa *Parliamentary Snapshot* kepada Analis PUSAKA. Pada tanggal 20 September 2024, penulis telah memaparkan produk *parliamentary snapshot* dihadapan Kepala Pusat Analisis Keparlemenan, Bapak Ahmad Sani Alhusain, S.E., M.A., jajaran analis legislatif senior, analis kebijakan, dan analis legislatif ahli pertama. Sosialisasi bertujuan untuk: (1) memperkenalkan kepada satuan kerja produk aktualisasi latsar CPNS yang sudah disusun; (2) menghimpun saran dan masukan perbaikan dari satuan kerja; dan (3) merekam persepsi dan testimoni dari pegawai di satuan kerja. Secara terperinci, hasil dari pelaksanaan tahapan kedua kegiatan keempat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Parliamentary snapshot* telah tersosialisasikan kepada segenap analis legislatif dan analis kebijakan di lingkungan PUSAKA;
- 2) Masukan perbaikan dari peserta sosialisasi mencakup penambahan nomor halaman, komitmen pembaharuan data secara rutin maupun serta-merta, dan perluasan variasi data hingga mencakup kerja sama regional.

- 3) Kepala PUSAKA memberikan apresiasi sangat positif terhadap *parliamentary snapshot* sebagai sebuah produk yang telah lama dicita-citakan oleh sejumlah analis senior yang pernah berkecimpung dalam kegiatan diplomasi keparlemenan.



Gambar 15. Sosialisasi *parliamentary snapshot* di Lingkungan PUSAKA

NO.	NAMA	INSTANSI/BIDANG	PARAF
1.	Fitria Melinda	Ekuinbang	[Signature]
2.	Devindra Rindang U.	Politikum	[Signature]
3.	Ulagga Sargina	Ekuinbang	[Signature]
4.	Fitri Wahid	Ekuinbang	[Signature]
5.	Chika Agahayya	Kesra	[Signature]
6.	Ariest Dwi Maulana	Ekuinbang	[Signature]
7.	Megatrikanti Kanti	Ekuinbang	[Signature]
8.	M. Zakik Abidin	Ekuinbang	[Signature]
9.	M. Zulkar Emir Zeggi	Ekuinbang	[Signature]
10.	B. Diaz P.	Ekuinbang	[Signature]
11.	A. Riza P.	Ekuinbang	[Signature]
12.	Fakhri Alim	KEPA	[Signature]
13.	Fauzan Gernadi R.	Ekuinbang	[Signature]
14.	Eva Muan G.	Kesra	[Signature]
15.	Rizka Alim Z.	Ekuinbang	[Signature]
16.	Yusuf Adi Mubra	Ekuinbang	[Signature]
17.	Riza Asri Yanti	Kesra	[Signature]
18.	Muhammad Ihsan Pribadi	Ekuinbang	[Signature]

NO.	NAMA	INSTANSI/BIDANG	PARAF
19.	Adis Hecumuan	Kesra	[Signature]
20.	Song Hendri P.	Ekuinbang	[Signature]
21.	Uly Nadi Puhw	Pusat Reformasi	[Signature]
22.	Buani Sengajetek	Kesra	[Signature]
23.	Desty Bulandari	Politikum	[Signature]
24.	Justina Sari	Politikum	[Signature]
25.	Pute Agudharan R.	Kesra	[Signature]
26.	Shady Gafar S. Olay	Kesra	[Signature]
27.	Aris Yan J. Mendapa	Ekuinbang	[Signature]
28.	Yosua - Pardamean S	Ekuinbang	[Signature]
29.	Mora S	Ekuinbang	[Signature]
30.	Katharin Ward Sidiyoh	Ekuinbang	[Signature]
31.	Johar Nur Wicet	Ekuinbang	[Signature]
32.	Ambarani Dwi R.	Ekuinbang	[Signature]
33.	Fauzi Ruz Longgo Geni	Ekuinbang	[Signature]
34.	Salma Saadman	Ekuinbang	[Signature]
35.	Dina Muli Nita	Ekuinbang	[Signature]
36.	Victor		
37.	Julia Indah		
38.	Selvi		
39.	Aer Muliata G		
40.	Budiman		

Gambar 16. Daftar hadir sosialisasi *Parliamentary Snapshot* di PUSAKA

Pelaksanaan Tahapan Ketiga

Tahapan ketiga adalah menyampaikan hasil aktualisasi secara luring dihadapan penguji, mentor, dan coach yang dilaksanakan di Wisma DPR, Kopo, Cisarua pada 4 Oktober 2024.

5.2 Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan pada pelaksanaan aktualisasi ini adalah:

- 1) Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI selaku tempat, penyedia sumber daya, dan sasaran pelaksanaan aktualisasi.
- 2) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif Setjen DPR RI selaku penyelenggara kegiatan pelatihan dasar CPNS Setjen DPR RI.
- 3) Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI selaku mitra kerja dan penerima manfaat dari rancangan aktualisasi tersebut.

5.3 Kendala dan Strategi Menghadapinya

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan aktualisasi dan strategi menghadapinya adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kendala Pelaksanaan Aktualisasi dan Strategi Menghadapinya

Kendala	Strategi
Kesediaan waktu informan yang sangat terbatas untuk melaksanakan wawancara karena pelaksanaan aktualisasi berada di bulan Agustus dan September dimana anggota dewan dan AKD memiliki agenda yang sangat padat	Mewawancarai tidak lebih dari dua orang yang dianggap paling representatif dalam memberikan penjelasan atas isu yang diangkat.
Lingkup <i>parliamentary snapshot</i> yang sangat luas karena mencakup dua ratusan negara dan organisasi internasional	<i>Parliamentary Snapshot</i> yang selama pelaksanaan aktualisasi dibatasi sebanyak empat negara.
Sumber informasi untuk pengisian data <i>parliamentary snapshot</i> dapat dipastikan 90% lebih berbahasa asing	Menggunakan perangkat lunak atau aplikasi yang dapat menerjemahkan informasi tersebut ke dalam Bahasa Indonesia
Publikasi daring via Simfoni tidak dapat dilakukan atas pertimbangan mencegah duplikasi data.	Mengirimkan salinan digital berkas <i>parliamentary snapshot</i> kepada Kabag Kerja Sama Bilateral BKSAP yang bisa diunggah ke laman resmi BKSAP.

5.4 Dampak

5.4.1 Dampak jangka pendek

Penyediaan data melalui *parliamentary snapshot* ditargetkan bisa memberikan dampak dalam jangka waktu 6-24 bulan ketika *parliamentary snapshot* seluruh negara dan organisasi internasional berhasil disusun. Wujud dari dampak jangka pendek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Mempercepat waktu pengumpulan data oleh PUSAKA untuk penelaahan dan penyusunan substansi diplomasi keparlemenan.** Dengan mengurangi dependensi data primer dari Kemlu dan tenaga ahli BKSAP, *parliamentary snapshot* dapat memangkas alur kerja pengumpulan data dan menghasilkan penghematan waktu yang drastis.
- 2) **Mempermudah tugas asistensi diplomasi keparlemenan oleh PUSAKA kepada anggota dewan dan alat kelengkapannya.** Disamping dapat dibaca langsung dengan mudah, *parliamentary snapshot* dapat menjadi referensi untuk penyusunan dokumen seperti butir wicara (*talking points*), siaran pers (*press release*), kata sambutan (*opening remarks*), laporan delegasi (*delegation report*), dan laporan kegiatan (*final report*).

5.4.2 Dampak jangka panjang

Penyediaan data melalui *parliamentary snapshot* ditargetkan bisa memberikan dampak dalam jangka waktu 24-36 bulan ketika *parliamentary snapshot* telah intensif dipergunakan dalam berbagai kegiatan diplomasi keparlemenan. Wujud dari dampak jangka panjang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memberikan nilai tambah pada basis data dan produk-produk analisis di Pusat Analisis Keparlemenan;
- 2) Meningkatkan performa layanan keahlian Analis Legislatif kepada anggota DPR beserta alat kelengkapannya;
- 3) Menjawab permasalahan penyediaan data primer sebagaimana tertuang pada Laporan Kinerja Badan Keahlian DPR RI tahun 2023 dan Laporan Kinerja Pusat Analisis Keparlemenan tahun 2023.

BAB 6

PENUTUP

Pusat Analisis Keparlemenan (PUSAKA) merupakan sebuah unit kerja di lingkungan Badan Keahlian Setjen DPR RI yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam memberikan layanan keahlian kepada anggota dewan dan alat kelengkapan. Analisis legislatif di lingkungan Pusat Analisis Keparlemenan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menelaah, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi yang mendukung fungsi legislatif, termasuk diplomasi keparlemenan. Kendati demikian, hingga saat ini belum tersedia data primer hubungan bilateral keparlemenan di PUSAKA.

Kegiatan aktualisasi ini menawarkan gagasan berupa sebuah lembar data yang disebut dengan *parliamentary snapshot*. Melalui dokumen ini, informasi dan data yang dianggap paling relevan untuk diketahui pelaksana diplomasi keparlemenan, diringkas dalam matriks dan uraian narasi sederhana. Pemilihan jenis data dan informasi yang tepat untuk dimuat dalam sebuah *parliamentary snapshot* sudah melalui serangkaian survei ke praktisi fasilitator diplomasi keparlemenan di lingkungan PUSAKA dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI serta dukungan kepustakaan terkait.

Parliamentary Snapshot merupakan akumulasi pengejawantahan tiga fungsi jabatan analisis legislatif. Pertama, “analisis” yang cepat dan menyeluruh diperlukan untuk mengumpulkan dan menuangkan data pada dokumen ini. Kedua, dokumen ini sangat diperlukan untuk memperkuat “asistensi” analisis legislatif dalam mendukung anggota dewan beserta alat kelengkapan terkait ketika merealisasikan fungsi diplomasinya. Ketiga, *parliamentary snapshot* merupakan instrumen “ekspose” hasil analisis yang berkesinambungan terhadap isu hubungan internasional.

Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan dengan merealisasikan sepenuhnya nilai-nilai dasar BerAKHLAK. Hasil aktualisasi juga telah disosialisasikan dan mendapat apresiasi positif. Kedepannya diharapkan *Parliamentary snapshot* dapat memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi peningkatan kinerja jabatan analisis legislatif di instansi PUSAKA.

DAFTAR PUSTAKA

Nainggolan, Poltak P., (2020). Diplomasi Parlemen. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

DPR RI. (Jan, 2024). Laporan Kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2023.

DPR RI. (Jan, 2024). Laporan Kinerja Pusat Analisis Keparlemenan Tahun 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Galeri Foto Mentoring



Lampiran 2 Galeri Foto Coaching



Lampiran 3 Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama : Devindra Oktaviano
 NIP : 199412152024041001
 Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
 Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama
 Isu Kegiatan : Belum tersedianya data primer hubungan bilateral keparlemenan di Pusat Analisis Keparlemenan

Kegiatan 1 : Pemetaan Data

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan 1. Penyebaran kuesioner pemilihan isu	1. PUSAKA pernah berupaya untuk mengkonsolidasikan data diplomasi keparlemenan namun belum terealisasi akibat keterbatasan sumber daya manusia 2. PUSAKA memiliki rekam jejak partisipasi yang besar dalam setiap agenda diplomasi keparlemenan, tetapi peran PUSAKA sebagai penyusun materi masih terkendala ketersediaan data dari lembaga eksekutif dan tenaga ahli kedewanan.	
Tahapan 2. Konsultasi dengan mentor dan analis senior di PUSAKA	1. Proses aktualisasi nanti perlu membuktikan dengan rinci peran dan manfaat langsung dari <i>parliamentary snapshot</i> bagi PUSAKA 2. Data tentang <i>people to people contact</i> perlu ditambahkan dalam <i>parliamentary snapshot</i>	
Tahapan 3. Studi kepustakaan tentang penyusunan <i>parliamentary snapshot</i>	1. Pelajari model snapshot Kemlu 2. Identifikasi butir-butir informasi tentang diplomasi keparlemenan yang tidak tersedia pada snapshot Kemlu.	

Kegiatan 2: Pengumpulan Data

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan 1. Wawancara dengan analis di lingkungan PUSAKA yang berpengalaman dalam agenda diplomasi keparlemenan	1. Buat sampel <i>parliamentary snapshot</i> lebih kurang 5 negara. Kawasan Asia Tenggara menjadi prioritas. 2. <i>Parliamentary Snapshot</i> dapat menjadi jawaban atas inisiatif sejumlah analis senior untuk mengumpulkan data primer diplomasi keparlemenan di Aplikasi Simfoni.	
Tahapan 2. Wawancara dengan pegawai di lingkungan BKSAP	1. Kumpulkan data diplomasi keparlemenan yang banyak beredar di tenaga ahli BKSAP. 2. Tanyakan ekspektasi BKSAP perihal muatan data dan informasi yang perlu tertuang dalam sebuah <i>parliamentary snapshot</i>.	
Tahapan 3. Studi kepustakaan tentang hubungan bilateral keparlemenan Indonesia	1. PUSAKA pernah memiliki peneliti bidang hubungan internasional yaitu Poltak P. Nainggolan. Publikasinya dapat dipelajari sebagai referensi diplomasi keparlemenan. 2. Sumber data daring tentang hubungan bilateral keparlemenan salah satunya adalah laman resmi Inter-Parliamentary Union	

Kegiatan 3 : Pengolahan Data

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan 1. Penyusunan matriks data <i>parliamentary snapshot</i>	1. Pastikan jenis data yang dimasukkan dalam <i>parliamentary snapshot</i> relevan tapi tidak berlebihan 2. Masukkan data tentang ringkasan <i>people to people contact</i> antara Indonesia dengan negara yang dipilih.	

Tahapan 2. Penempatan data dan informasi sesuai kategori	1. Produk <i>parliamentary snapshot</i> Ethiopia, Laos, dan Uzbekistan sudah sangat baik dan melingkupi data dan informasi yang dibutuhkan.	
---	---	---

Kegiatan 4 : Penyajian Data

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan 1. Mengunggah <i>parliamentary snapshot</i> versi daring ke Simfoni atau media pangkalan data daring lainnya	1. Tidak masalah apabila <i>parliamentary snapshot</i> tidak jadi diunggah ke Simfoni, karena telah menyampaikan <i>parliamentary snapshot</i> Amerika Serikat ke BKSAP sudah menunjukkan peran nyata analisis legislatif dalam mendukung AKD.	
Tahapan 2. Pemaparan sampel <i>Parliamentary Snapshot</i> dihadapan Analisis PUSAKA dan personel BKSAP (tentatif).	1. <i>Parliamentary Snapshot</i> ini berhasil menjawab harapan dari analisis bidang Polhukam PUSAKA yang sejak lama ingin mempunyai basis data sendiri tentang diplomasi keparlemenan. 2. Beberapa fitur agar ditambahkan seperti penomoran halaman.	
Tahapan 3. Finalisasi laporan, sampel <i>Parliamentary Snapshot</i> , dan paparan laporan	1. Pastikan semua kelengkapan administrasi dan tahapan aktualisasi sudah tercapai sebelum paparan pada 4 Oktober nanti.	

Lampiran 4 Formulir Alat Bantu Coaching Aktualisasi

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN TAHUN 2024

Nama : Devindra Ramkas Oktaviano
Instansi : Pusat Analisis Keparlemenan Setjen DPR RI
NIP : 199412152024041001

No	Tanggal Bimbingan	Hal yang dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Bimbingan	Tanda Tangan Coach
1	30 Juli 2024	Penyusunan rancangan aktualisasi	Tatap Muka	- Perkuat penjelasan tentang korelasi topik dengan tugas dan fungsi jabatan. - Lengkapi ketiga isu dengan foto-foto yang memadai.	
2	9 Agustus 2024	Pemantapan rancangan aktualisasi	Tatap Muka	Uraikan alur proses penyusunan <i>parliamentary snapshot</i>.	
3	12 Agustus 2024	Evaluasi rancangan aktualisasi	Aplikasi Zoom	Tambahkan pengantar singkat tentang topik yang diangkat pada subbab latar belakang.	
4	14 Agustus 2024	Persiapan pelaksanaan aktualisasi	Aplikasi Zoom	- Koordinasikan terlebih dahulu pihak-pihak yang menjadi sumber data. - Jelaskan arti penting <i>parliamentary snapshot</i> sebagai sebuah inovasi.	

4	26 Agustus 2024	Pelaksanaan tahapan aktualisasi	Aplikasi WhatsApp	▪ Terangkan implementasi aktualisasi pada nilai-nilai dasar PNS ▪ Pastikan <i>Parliamentary Snapshot</i> tersedia daring	
5	17 September 2024	Laporan akhir aktualisasi	Aplikasi WhatsApp	▪ Berikan ilustrasi ringkas yang intuitif pada saat paparan ▪ Laksanakan sosialisasi dengan undangan analis di lingkungan PUSAKA	

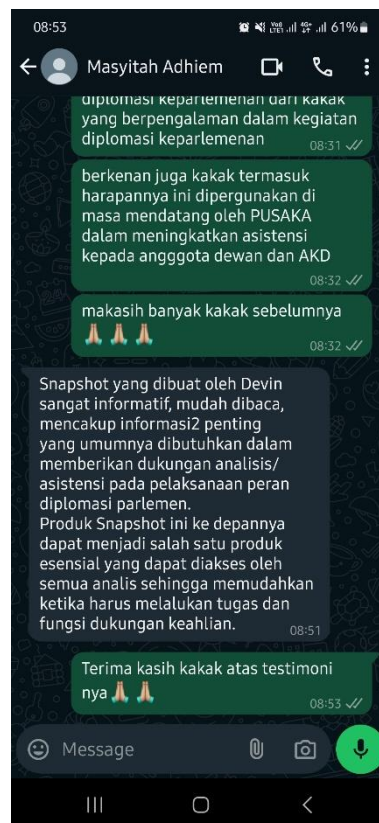
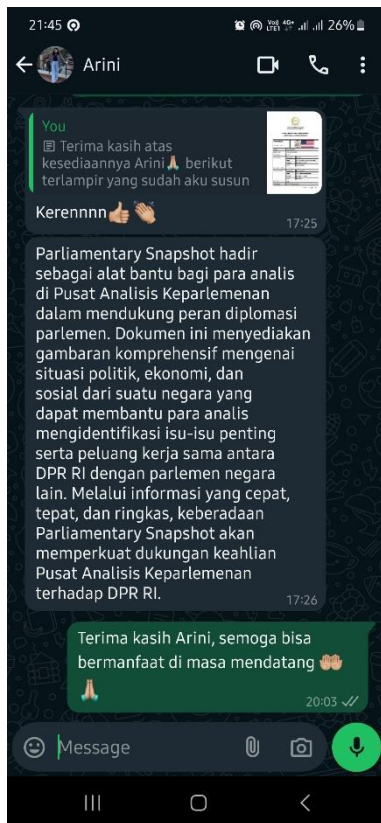
Lampiran 5. Dokumentasi Testimoni



Tautan video: https://1drv.ms/v/s!Aml8Ws_xsP3dzi-OVC511JkykfMU?e=Cnb9A7



Tautan video: https://1drv.ms/v/s!Aml8Ws_xsP3dzjAnTRZIBZBtG4FF?e=5mQhsi



Lampiran 6. Berkas Parliamentary Snapshot



PUSAT ANALISIS KEPARLEMANAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

PARLIAMENTARY SNAPSHOT INDONESIA – AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat <i>United States of America</i>			
Ibukota	Washington, D.C.		
Sistem Politik	Republik Presidensial		
Bentuk Negara	Federal		
Kepala Negara	Nomenklatur	<i>President</i>	
	Nama	[BAPAK] Joseph R. Biden Jr. (Joe Biden)	
	Menjabat	Sejak 20 Januari 2021	
	Afiliasi	Partai Demokrat	
Kepala Pemerintahan	<i>sama dengan kepala negara</i>		
Menteri Luar Negeri	Nomenklatur	<i>Secretary of State</i>	
	Nama	[BAPAK] Antony John Blinken	
	Menjabat	Sejak 26 Januari 2021	
	Afiliasi	profesional	

Bahasa Nasional	Inggris	
Hari Nasional	4 Juli (Hari kemerdekaan)	
Luas Wilayah	9.833.520 km ²	
Jumlah Penduduk	343.477.335 (terbesar ketiga di dunia)	
Agama	Kristen (67%), Atheis (22%), Yahudi (2%)	
Etnis/Suku/Ras	Kaukasus (61,6%), Negro (12,4%), Asia (6%)	
PDB	USD 27.360.935.000.000 (th. 2023, <i>terbesar di dunia</i>)	
PDB per kapita	USD 81.695,2 (th. 2023)	
Pertumbuhan ekonomi	2,5% (th. 2023)	
HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – AMERIKA SERIKAT		
Duta Besar RI untuk Amerika Serikat	Nama	[Bapak] Ida Bagus Made Bimantara
	Menjabat	kuasa usaha ad interim, mewakili jabatan dubes yang kosong sejak 18 Juli 2023
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia	Nama	[Ibu] Kamala Shirin Lakhdar
	Menjabat	Sejak 8 Agustus 2024
Sejarah hubungan diplomatik	▪ 28 Desember 1949 – Hubungan diplomatik Indonesia – Amerika Serikat dimulai	
Kepentingan Indonesia terhadap AS	1. Peran aktif Amerika Serikat dalam stabilitas geopolitik 2. Alih pengetahuan dan teknologi 3. Akses pasar produk Indonesia 4. Penguatan kapabilitas pertahanan	
Kepentingan AS terhadap Indonesia	1. Diplomasi di kawasan Asia Tenggara 2. Akses pasar 3. Penyebaran nilai demokrasi 4. Kolaborasi mitigasi perubahan iklim 5. Akses mineral mentah	
Pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan <i>dalam 10 tahun terakhir</i>	▪ 25-27 Oktober 2015. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat ▪ 2-5 Agustus 2021. Penyelenggaraan pertama Dialog Strategis antara menu kedua negara ▪ 14 November 2023. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, membahas penguatan kemitraan bilateral dan isu konflik Gaza	

Hubungan Bilateral di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	▪ Indonesia – US Strategic Partnership (2015) ▪ Indonesia – US Comprehensive Strategic Partnership (2023)
Hubungan Bilateral di bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan	1. Komoditas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah komponen listrik, pakaian jadi, tekstil, minyak dan lemak tumbuhan, karet, dan makanan 2. Total nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2023 adalah USD 23.246.846.450. Nilai ini menurun dari tahun 2022 yang sebesar USD 28.182.720.206 3. Komoditas impor Indonesia dari Amerika Serikat adalah gas bumi, buah dan biji yang mengandung minyak, mesin dan reaktor nuklir, pesawat terbang dan wahana antariksa, limbah industri makanan dan pakan ternak, senyawa organik, peralatan listrik dan elektronik, material serat selulosa, makanan, peralatan optik, dan plastik. 4. Total nilai Impor Indonesia dari Amerika Serikat tahun 2023 adalah USD 11.277.452.388. Nilai ini menurun dari tahun 2022 yang sebesar USD 11.614.699.726. 5. Perjanjian bilateral Indonesia dan AS di bidang ekonomi diantaranya: Trade and Investment Framework Agreement dan Indonesia-US Investment Support Agreement-Overseas Private Investment Corporation. 6. Indonesia merupakan penerima hibah Millenium Challenge Corporation dan USAID dari Amerika Serikat.
Hubungan bilateral di bidang Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah pelajar Indonesia yang berkuliah di Amerika Serikat adalah 8.467 orang (IIE, 2023). 2. Terdapat 700 Nota Kesepahaman aktif antara perguruan tinggi Indonesia dengan Amerika Serikat. 3. Memorandum of Understanding Concerning the Establishment of the American-Indonesian Exchange Foundation/AMINEF (16 Februari 2009).
Potensi kerja sama bilateral	1. Perluasan akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat melalui perpanjangan <i>Generalized System of Preferences</i>. 2. Penguatan diplomasi pertahanan melalui intensifikasi latihan bersama dan pengiriman personel TNI ke lembaga pendidikan militer di Amerika Serikat. 3. Energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim. 4. Infrastruktur kesehatan.
Forum Multilateral RI-AS	▪ Perserikatan Bangsa-Bangsa ▪ G20 ▪ G77 ▪ United Nations Conference of Parties / COP ▪ World Trade Organization ▪ APEC ▪ Super Garuda Shield Exercise ▪ CARAT Exercise

PROFIL PARLEMEN		
Jenis Badan Legislatif	Bikameral	
Majelis Rendah (<i>ekivalen DPR RI</i>)	Nama: House of Representative / Dewan Perwakilan Jumlah Anggota: 435 orang Keterwakilan Perempuan: 29%	
Ketua Majelis Rendah <i>speaker of lower chamber</i>	Nama	[BAPAK] Mike Johnson
	Tanggal lahir	30 Januari 1972
	Menjabat	25 Oktober 2023
	Afiliasi Politik	Partai Republik
Sekretaris Jenderal Majelis Rendah <i>clerk</i>	Nama	[BAPAK] Kevin McCumber
	Menjabat	sejak 1 Juli 2023
Pileg Terakhir	8 November 2022	
Pileg Mendatang	5 November 2024	
Partai di parlemen	▪ Republik ▪ Demokrat	

PERTEMUAN BILATERAL KEPARLEMENAN INDONESIA-AMERIKA SERIKAT

1	Tanggal	10 Juli 2020
	Deskripsi	Pertemuan daring GKSB DPR RI-Parlemen AS dengan anggota Kongres
	Pihak Parlemen RI	▪ Fadli Zon (F-Gerindra, Ketua BKSAP) ▪ Mardani Ali Sera (F-PKS, Wakil Ketua BKSAP) ▪ Charles Honoris (F-PDIP, Ketua GKSB) ▪ Budisatrio Djiwandono (F-Gerindra)
	Pihak Parlemen AS	▪ Ted Yoho
	Bahasan dan Hasil	▪ Perkembangan Laut Cina Selatan ▪ Penanganan COVID dan vaksin ▪ Peran Indonesia di ASEAN ▪ Perkembangan demokrasi di RI dan AS ▪ Perdagangan di bidang pertanian dan perikanan ▪ Rencana pemulangan mahasiswa RI yang belajar di AS ▪ Permasalahan kesehatan
2	Tanggal	14 Juli 2020
	Deskripsi	Pertemuan daring GKSB DPR RI-Parlemen AS dengan anggota Kongres
	Pihak Parlemen RI	▪ Mardani Ali Sera (F-PKS) ▪ Charles Honoris (F-PDIP) ▪ Budisatrio Djiwandono (F-Gerindra)
	Pihak Parlemen AS	▪ Ami Bera
	Bahasan dan Hasil	▪ Kerja sama internasional dalam penanganan COVID dan penemuan vaksin. ▪ Peran AS pada isu Laut Cina Selatan. ▪ Peluang pengalihan investasi dari Amerika ke Indonesia terutama di bidang manufaktur. ▪ Investasi di bidang energi baru terbarukan dan ramah lingkungan, perkembangan ▪ Demokrasi di RI dan AS. ▪ isu Palestina, termasuk perihal proposal Deal of Century AS yang mendapatkan banyak penolakan ▪ permasalahan rencana pemulangan mahasiswa asing yang belajar di AS
3	Tanggal	12 November 2021

	Deskripsi	Ketua GKSB DPR RI-Parlemen AS bersama Korpolkam Wakil Ketua dan Anggota BKSAP menerima Delegasi Kongres AS
	Pihak Parlemen RI	▪ Lodewijk Paulus (F-PG) ▪ Putu Supadma (F-PD) ▪ Dave Laksono (F-PG) ▪ Charles Honoris (F-PDIP)
	Pihak Parlemen AS	▪ Ami Bera ▪ Juan Vargas ▪ Abigail Spanberger ▪ Derek Kilmer
	Hasil	▪ Penanganan COVID-19 ▪ Kedamaian kawasan Indo-Pasifik ▪ Pemulihan ekonomi pasca COVID-19 ▪ Kemajuan demokrasi Indonesia
4	Tanggal	12 April 2022
	Deskripsi	GKSB DPR RI-Parlemen AS menghadiri pertemuan di Kediaman Kedubes AS di Jakarta.
	Pihak Parlemen RI	▪ Charles Honoris (F-PDIP, Ketua GKSB) ▪ Budisatrio Djiwandono (F-PG) ▪ Eddy Soeparno (F-PAN)
	Pihak Parlemen AS	▪ Sung Y. Kim (Dubes AS untuk RI)
	Bahasan dan hasil	▪ peningkatan hubungan kerjasama RI-AS, terutama terkait kerjasama antar parlemen sebagai bentuk <i>second track diplomacy</i> ▪ penyampaian rencana kunjungan GKSB DPR-Parlemen AS pada Oktober mendatang. ▪ Apresiasi DPR RI atas kerja sama vaksin RI-AS senilai USD 55 juta ▪ RI dan AS punya kesamaan kepentingan global dan regional seperti stabilitas kawasan Laut Cina Selatan, perdagangan dan investasi, hingga upaya bersama mengurangi dampak perubahan iklim ▪ Dubes AS mengemukakan masih terdapat banyak sektor kerja sama potensial yang perlu ditingkatkan antara RI dan AS seperti energi terbarukan, infrastruktur kesehatan, konservasi maritim, hingga kerja sama terkait perubahan iklim. ▪ Dubes AS mendukung kepemimpinan Indonesia pada G20 dan arti penting kepemimpinan Indonesia di fora internasional. ▪ Dubes AS berharap dukungan RI pada Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang akan segera dirilis.

5	Tanggal	6 Oktober 2022
	Deskripsi	Pertemuan bilateral Ketua DPR RI dengan Chairman of the U.S. House of Representatives Foreign Relations Committee, H.E. Mr. Gregory Meeks di sela – sela sidang P20 di Jakarta
	Pihak Parlemen RI	▪ Puan Maharani (F-PDIP, Ketua DPR RI)
	Pihak Parlemen AS	▪ Gregory Meeks (Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat)
	Bahasan dan hasil	▪ Mendorong peningkatan kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan, investasi, pendidikan, pariwisata dan sosial budaya ▪ Apresiasi DPR RI atas Kemitraan Strategis RI-AS dan berharap dapat meningkatkan kerjasama bukan hanya antar parlemen tetapi juga <i>people-to-people</i>. ▪ AS menyampaikan pentingnya peran RI sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia, serta mitra strategis AS dalam kerjasama regional dan global. ▪ Apresiasi atas upaya Indonesia dalam menanggapi krisis di Myanmar, dan memberikan suaka kepada para pengungsi Rohingya ▪ AS menyambut baik Keketuaan Indonesia ASEAN 2023
6	Tanggal	11 April 2023
	Deskripsi	BKSAP dan GKSB DPR RI-Parlemen AS menerima kunjungan delegasi Kongres AS yang dipimpin oleh Jeff Merkley di Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta
	Pihak Parlemen RI	▪ Fadli Zon (F-Gerindra, Ketua BKSAP) ▪ Charles Honoris (FPDIP, Ketua GKSB)
	Pihak Parlemen AS	▪ Jeff Merkley ▪ Pramila Jayapal ▪ Ilhan Omar
	Bahasan dan hasil	▪ Penekanan oleh parlemen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di bidang energi terbarukan, transisi energi, lingkungan, perubahan iklim, konservasi, pertahanan, kesehatan, dan hubungan antar masyarakat. ▪ Apresiasi atas keketuaan Indonesia pada G20 di tahun 2022 dan penyampaian harapan atas kesuksesan kegiatan ASEAN dan AIPA di Indonesia pada tahun 2023.
7	Tanggal	3 Mei 2023

	Deskripsi	GKSB DPR RI-Parlemen AS menerima kunjungan delegasi House of Democracy Partnership Kongres Amerika Serikat.
	Pihak Parlemen RI	- Charles Honoris (F-PDIP, Ketua GKSB) - Irine YR Putri (F-PDIP) - Budisatrio Djiwandono (F-Gerindra)
	Pihak Parlemen AS	Vern Buchanan (Chairman HDP)
	Bahasan dan Hasil	- Dorongan DPR RI untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di sektor pertahanan, ekonomi, investasi, perdagangan, energi terbarukan, lingkungan, dan <i>people to people contact</i>. - Komitmen HDP untuk memastikan iklim demokrasi berjalan dengan baik di negara mitra termasuk perihal keterbukaan informasi dari pemerintah, penanggulangan disinformasi, kesetaraan gender, dan partisipasi politik pemuda.
8	Tanggal	28 Agustus 2023
	Deskripsi	Working Lunch BKSAP dan GKSB DPR RI-Parlemen AS dengan delegasi Kongres Amerika Serikat di Indonesia.
	Pihak Parlemen RI	- Gilang Dhielafararez (F-PDIP, Wakil Ketua BKSAP) - Sukamta (F-PKS) - Charles Honoris (FPDIP, Ketua GKSB) - Budisatrio Djiwandono (F-Gerindra)
	Pihak Parlemen AS	Young Kim (Ketua Subkomite Indo-Pasifik Komisi Luar Negeri US House of Representative)
	Bahasan dan hasil	- Peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, pertanian, dan kesehatan - Peningkatan <i>people to people contact</i> melalui pertukaran mahasiswa - Stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan.
9	Tanggal	19 Juni 2024
	Deskripsi	Pertemuan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dengan the House of Democracy Partnership di Gedung Nusantara III, Jakarta
	Pihak Parlemen RI	Sukamta (F-PKS)
	Pihak Parlemen AS	Nick J. Rahall beserta anggota delegasi HDP

	Bahasan dan hasil	▪ Program pertukaran pemikiran dan informasi yang dilakukan untuk sekretariat parlemen ▪ Apresiasi atas hubungan kedua pihak yang telah terjalin dari waktu ke waktu ▪ Pengutamaan nilai demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ▪ Pembelajaran akan nilai demokrasi bagi kedua negara serta saling berbagi informasi penerapan demokrasi di masing-masing negara.
10	Tanggal	19 September 2024
	Deskripsi	GKSB DPR RI-Parlemen AS berkunjung ke Parlemen Amerika Serikat
	Pihak Parlemen RI	▪ Charles Honoris (F-PDIP, Ketua GKSB) ▪ Junico B.P. Siahaan (F-PDIP) ▪ Marinus Gea (F-PDIP) ▪ Irine YR Putri (F-PDIP) ▪ Ahmad Doli Kurnia Tandjung (F-PG) ▪ Ruslan M. Daud (F-PKB) ▪ Rizki AR Natakusumah (F-PD) ▪ Jon Erizal (F-PAN)
	Pihak Parlemen AS	▪ Young Kim (Ketua Subkomite Indo-Pasifik Komisi Luar Negeri US House of Representative) ▪ Ami Bera
	Bahasan dan Hasil	▪ Apresiasi kedua belah pihak atas peningkatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai aspek ▪ Apresiasi kedua belah pihak atas peningkatan hubungan bilateral antar parlemen kedua negara yang ditandai dengan intensifnya pertemuan dan saling kunjung ▪ Komitmen untuk memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian di kawasan dan global. Diantara isu yang menjadi perhatian bersama adalah AUKUS, Laut Cina Selatan, konflik Rusia-Ukraina, konflik Gaza, dan hubungan AS-CINA.
Forum Internasional Keparlemen RI-AS		▪ Inter-Parliamentary Union (IPU) ▪ P20 ▪ Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI – Parlemen AS dibentuk pada 26 Februari 2020. ▪ Indonesia tergabung dalam kemitraan legislasi House of Democracy Partnership pada tahun 2005.

ISU AKTUAL DI AMERIKA SERIKAT	
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	- Amerika Serikat mempunyai peran paling signifikan dalam dinamika hubungan internasional. Beberapa yang sangat berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia adalah situasi di Laut Cina Selatan, forum AUKUS dan QUAD, perdamaian kawasan Timur Tengah, dan situasi di kawasan Kepulauan Pasifik. - Amerika Serikat adalah eksportir senjata terbesar di dunia - Amerika Serikat akan menggelar pilpres dan pileg pada November 2024 - Peningkatan kasus penembakan massal. - Peningkatan kasus penanganan tidak profesional oleh aparat kepolisian terhadap warga dari kalangan tertentu. - Polemik penanganan dan pemenuhan hak imigran.
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan	- AS menyumbang 13 juta metrik ton karbon dioksida pada tahun 2023 (terbesar kedua di dunia) - Kebakaran lahan masih sering terjadi di AS. Pada tahun 2023 terjadi 56.580 kasus kebakaran lahan dengan luasan terdampak sebesar 2,7 juta hektar. - AS adalah eksportir produk pertanian terbesar di dunia. Pada tahun 2023 nilai ekspor pertanian mencapai 179 miliar dollar. - Infrastruktur publik di AS, termasuk transportasi sudah tertinggal akibat minim investasi perbaikan dan penggantian baru. - Meskipun sektor manufaktur AS memiliki luaran hingga 2,5 Triliun dollar dalam setahun namun semakin sedikit jumlah pekerjaan yang berhubungan dengan manufaktur dan porsi industri terhadap ekonomi nasional juga semakin menurun. - The Fed telah menaikkan suku bunga berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir akibat tren kenaikan inflasi di AS.
Bidang Kesejahteraan dan Sosial	- Biaya kesehatan dan pendidikan tinggi meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang membuat semakin tidak terjangkau. - Penduduk tunawisma pada tahun 2023 meningkat 12% menjadi hampir 653.000 orang. - Amerika Serikat adalah satu negara dengan tradisi olahraga yang unggul yang dibuktikan dengan perolehan medali di kompetisi olahraga internasional dan infrastruktur stadion yang berkelas